

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupataen/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tujuan : Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	- Kantor Bapedalitbang merupakan gedung kantor lama dan dilengkapi dengan gedung pertemuan kapasitas 300 orang. - Luas gedung kantor 600 m2 dan luas ruang pertemuan 800 m2 - Pegawai di Bapedalitbang 47 orang yang terdiri dari 35 orang ASN (21 orang laki-laki, 14 orang perempuan) dan 12 orang tenaga Honorer (8 orang laki-laki, 4 perempuan) - Belum adanya ruangan laktasi (ibu menyusui) - Belum adanya ruang bermain anak	Akses - Gedung yang ditempati merupakan gedung lama - Penyesuaian sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kondisi terkini Partisipasi - Kontrol - Penentuan asset gedung yang tidak terpakai lagi ditentukan sepenuhnya oleh biro aset Manfaat - Gedung semata-mata hanya bisa dipergunakan untuk pekerjaan kantor.	- Keterbatasan anggaran	- Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan sarana prasarana yang layak	Tujuan Program : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapedalitbang melalui peningkatan pelayanan secara internal terhadap pegawai maupun tamu yang datang. Tujuan kegiatan: meningkatkan pelayanan umum di Bapedalitbang melalui peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.	- Membangun ruangan laktasi (ibu menyusui). - Membangun ruangan bermain anak	- Belum adanya ruangan laktasi (ibu menyusui) - Belum adanya ruang bermain anak	Input; Rp. 300.000.000,- Output: - tersedianya ruangan laktasi (Ibu menyusui) - tersedianya ruangan bermain anak Outcome; Meningkatnya kinerja pegawai Bapedalitbang dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau tamu yang datang ke kantor.

Rainan, Mei 2023
Kepala Badan Perencanaan daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan



HADI SUSILO, S.STP, M.Si.
NIP.19770512 199703 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatena/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tujuan : Tepenuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kantor Bapedalitbang merupakan gedung kantor lama dan dilengkapi dengan gedung pertemuan kapasitas 300 orang. - Luas gedung kantor 600 m2 dan luas ruang pertemuan 800 m2 - Jumlah tenaga pelayanan umu kantor 15 orang (8 pria, 7 wanita) - Petugas Kebersihan 5 orang (2 pria, 3 wanita) - Pram Tamu 5 orang (3 pria, 2 wanita) - Pengolah Data 2 org Wanita - Pembantu admin 1 orang pria - Keamanan 2 orang pria	Akses - Petugas kebersihan lebih banyak wanita - Pram tamu lebih banyak pria - Pengolah data semuanya Wanita - Keamanan semuanya pria Partisipasi - Penempatan pekerjaan kebersihan lebih banyak wanita karena di dalam Gedung sementara pria di luar gedung. - Pria lebih dipercaya menjadi Pram Tamu - Wanita lebih dipercaya menjadi pengolah data - Pria lebih dipercaya sebagai Keamanan Kontrol - Penentuan posisi pekerjaan kebersihan oleh pria - pria lebih dominan dalam pengaturan jadwal piket pramu tamu - data dikontrol oleh perempuan	- Dalam hal kebersihan masih ada anggapan bahwa pekerjaan dalam rumah lebih cenderung kepada Wanita - Telah terjadi pergeseran budaya tentang pramu tamu bahwa keramah tamahan dan atraktif yang selama ini dianggap cenderung dengan Wanita sudah tidak berlaku lagi. - Masih terdapat anggapan bahwa Wanita lebih teliti dari pria sehingga data hanya dioleh oleh Wanita - Masih ada anggapan bahwa keamanan adalah pekerjaan yang identic dengan pria	- Adanya intervensi dari pemangku kepentingan dalam hal rekrutmen tenaga pelayanan umum. - Masih adanya anggapan dalam masyarakat bahwa pengambil keputusan dan pekerjaan yang berkaitan dengan kekuatan adalah domainnya pria.	Tujuan Program : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapedalitbang melalui peningkatan mobilisasi laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi. Tujuan kegiatan: meningkatkan pelayanan umum di Bapedalitbang melalui peningkatan kinerja pekerja pria dan Wanita.	- Melakukan pemetaan beban kerja masing-masing petugas kebersihan dan membagi tugas secara adil antara pria dan Wanita. - Menyusun jadwal piket secara adil - Melaksanakan Bimtek Tentang pelayanan Prima pada layanan perkantoran	- Kantor Bapedalitbang merupakan gedung kantor lama dan dilengkapi dengan gedung pertemuan kapasitas 300 orang. - Luas gedung kantor 600 m2 dan luas ruang pertemuan 800 m2 - Jumlah tenaga pelayanan umu kantor 15 orang (8 pria, 7 wanita) - Petugas Kebersihan 5 orang (2 pria, 3 wanita) - Pram Tamu 5 orang (3 pria, 2 wanita) - Pengolah Data 2 org Wanita - Pembantu admin 1 orang pria - Keamanan 2 orang pria	Input; Rp. 266.152.240,- Output: -Pria dan Wanita yang menjadi tenaga pelayanan umu kantor di Bapedalitbang -Pria dan Wanita mendapatkan beban kerja yang sama dan penghasilan yang sama. Outcome; Pria dan Wanita mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkompetisi menjadi pelaku ekonomi khususnya di kantor Bapedalitbang.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
		- Keamanan dikontrol oleh pria Manfaat -Petugas Kebersihan Pria bekerja lebih ringan dari Wanita dengan gaji yang sama -Pramu Tamu pria lebih banyak sehingga kesempatan kerjanya lebih tinggi yang berujung pada penghasilan -Kesempatan kerja sebagai pegolah data di dominasi perempuan sehingga penghasilan sebagai pengolah data hanya oleh perempuan -Kesempatan kerja sebagai keamanan di dominasi oleh pria sehingga hanya pria yang mendapat penghasilan sebagai keamanan						

Painan, Mei 2023
Kepala Badan Perencanaan daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan



RADI SUSILO, S.TP, M.Si.
NIP. 19770522 199703 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bapedalitbang

Tahun : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupataen/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tujuan : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang representative	- Data Peralatan dan Mesin - Data Peralatan dan Mesin yang dipelihara - Pegawai di Bapedalitbang 47 orang yang terdiri dari 35 orang ASN (21 orang laki-laki, 14 orang perempuan) dan 12 orang tenaga Honorer (8 orang laki-laki, 4 perempuan)	Akses - Pemeliharaan dilakukan terhadap peralatan yang mengalami malfunction atau tidak bisa dioperasikan saja. Partisipasi - Tidak semua peralatan dan mesin dapat dilakukan pemeliharaan Kontrol - Penentuan asset yang dipelihara berdasarkan penilaian pimpinan dan anggaran yang tersedia Manfaat - Peralatan yang jarang dipergunakan tidak mendapat pemeliharaan	- Keterbatasan anggaran - Kurangnya tenaga IT untuk melakukan pemeliharaan secara swadaya - Kapasitas Pegawai yang memiliki kemampuan dasar pemeliharaan peralatan dan mesin yang masih rendah	- Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan pencegahan terhadap terjadinya kerusakan berat pada peralatan dan mesin	Meningkatkan kinerja Bapedalitbang	- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan dan mesin secara berkala - Melakukan rekrutmen tenaga yang ahli dalam bidang pemeliharaan peralatan dan mesin yang tersedia - Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam memahami pemeliharaan dasar peralatan dan mesin di kantor.	- Data Peralatan dan Mesin - Data Peralatan dan Mesin yang dipelihara - Pegawai di Bapedalitbang 47 orang yang terdiri dari 35 orang ASN (21 orang laki-laki, 14 orang perempuan) dan 12 orang tenaga Honorer (8 orang laki-laki, 4 perempuan)	Kegiatan 1; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Input; Rp. 120.000.000,- Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya bapedalitbang Outcome; Terpeliharanya asset peralatan dan mesin

Painan, Mei 2023

Kepala Badan Perencanaan daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan



HADI SUSILO, S.STP, M.Si.
NRP. 19770522 199703 1 001

Keywords: child sexual abuse; disclosure; self-blame; social support

OPD : Bappeda Litbang.
HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pemrijan Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota	Pemrijan Urusan Pemerintah Daerah	Pemrijan Urusan Pemerintah Daerah	1. Rute & Rencana Aksi: Form 2. Penilaian Kantor atau Ruang Menyusui 3. Penilaian Peralatan Kantor yg mendukung kenyamanan bekerja. 4. Sosialisasi thdp. Pelaksana Peningkatan Kapasitas Ring Pelaksana Umur 5. Lokasi & Waktu Kegiatan yg terpisah dan Masig? Kegiatan. 6. Rincian Pelaksanaan Selasa 17/5.2023

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Yunarti & Iusi		Drs. Adin, M.Si	
2	Sopianeri & H		FEBRIANI, SS	
3	Abdul Halim & P			
4	Irene Yulia			

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sesuai dengan Merit Sistem dan pemetaan kinerja	Kontrol: Membuat pengontrolan tentang penilaian dan evaluasi kinerja				Melakukan pemetaan kinerja untuk 40 ASN	Output : Jumlah ASN Yang dilakukan Pemetaan dan Evaluasi Jabatan : 40 orang
	Pengembangan Kompetensi merupakan Point - Point Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan BKPSDM yaitu Indeks Profesionalitas ASN						

Palinan, 16 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN



Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan kompetensi bagi setiap ASN dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun	Kontrol: Membuat pengontrolan yang akan melakukan kompetensi ASN, jika ada anggaran tersedia			Perlunya dibuatkan edaran tentan ASN wajib setiap tahun mengikuti bimbingan / sosialisasi / coaching clinic 20 JPL		Output : jabatan yang sesuai dengan Kompetensi Jabatan dan Anjab
	Pengembangan Kompetensi merupakan Point - Point Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan BKPSDM yaitu Indeks Profesionalitas ASN						
	Sesuai dengan Permendagri No 84 Tahun 2022, tentang penganggaran tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak menyediakan untuk dana kompetensi ASN sebesar minimal 0.16% dari dana DAU Kabupaten Pesisir Selatan						



MATRIKS GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBUAKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBUAKAN DNA RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
Program: Kepegawalan Daerah	Sesuai amanat pada PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN	Akses : Belum optimalnya pelaksanaan e-kinerja ASN yang terintegrasi dengan aplikasi SIAASN	Kurangnya Kompetensi Dalam Mengolah Bagian Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja	Kurang pemahaman ASN lain tentang evaluasi kinerja yang dibuat setiap tahunnya berupa SKP	Perlu nya sosialisasi dan bimbingan khusus tentang penilaian dan evaluasi kinerja berbasis aplikasi e - kinerja	Melakukan pembuatan tim kinerja untuk mengejar sasaran ke bawah	Masih banyaknya ASN yang belum mengetahui pembuatan SKP versi tahun 2022	Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pembinaan dan penilaian kinerja ASN	Partisipasi : Rendahnya partisipasi ASN (laki - laki) tentang penilaian dan evaluasi kinerja ASN		Perlu nya dilakukan penilaian kinerja berupa pemetaan kinerja sesuai jabatannya	Perlu nya dilakukan penilaian kinerja berupa pemetaan kinerja secara bertahap	Melakukan bimbingan ke ASN tentang pengolahan evaluasi kinerja berupa SKP	Masih adanya ASN yang belum diletakkan sesuai dengan kemampuan	Input : Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

MATRIKS GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPO

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBUJUKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBUJUKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
Program: Kepegawain Daerah	Sesuai amanat pada PP No 11 Tahun 2017 Pasal 203 Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana	Akses : Belum optimalnya pelaksanaan dokumen analisa ASN untuk jabatan fungsional terutama pengalihan jabatan fungsional penyetaraan	Karena adanya persindihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Penyetaraan, sehingga belum membuatnya Analisa jabatan fungsional	Peraturan - peraturan yang masih baru mengenal Jabatan Fungsional Penyetaraan Belum Terakomodir	Perlunya Kesesuaian Kinerja Jabatan Fungsional sesuai keahliannya dan kompetensinya	Memberikan pembinaan kepada jabatan fungsional penyetaraan. Melakukan rencana analisa jabatan fungsional, memberikan informasi tentang peraturan jabatan fungsional penyetaraan	Masih banyak ASN yang belum memahami tentang pelatihan manajerial, teknis dan fungsional	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pembinaan jabatan fungsional ASN	Partisipasi : Rendahnya partisipasi ASN (perempuan) dalam mengikuti jabatan fungsional			Perlunya dibuatkan peraturan bupati tentang jabatan fungsional	Mendahulukan kebutuhan kompetensi ASN, bagi ASN yang naik jenjang karena berkaitan dengan jabatan yang dipegang		Input : Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sub Kegiatan : Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN sesuai dengan Permenpan No 1 Tahun 2023	Kontrol: Membuat pengontrolan yang akan melakukan kenaikkan jenjang bagi Jabatan Fungsional ASN dan Peralihan ke Jabatan Fungsional, jika ada anggaran tersedia						Output : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang dibina : 175 orang
	Pengembangan Kompetensi merupakan Point - Point Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan BKPSDM yaitu Indeks Profesionalitas ASN							

Painan, 16 Mei 2023

KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
KELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA



TAMIR, S.H., M.M
NIK 19620312 198803 1 003

MATRIKS GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD

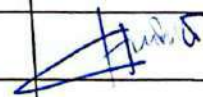
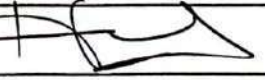
: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSOM)

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBUJUKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENIANGAN	SEBAB KESENIANGAN INTERNAL	SEBAB KESENIANGAN EKSTERNAL	REFORMASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai amanat pada PP No 11 Tahun 2017 Pasal 203 Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana	Akses : Belum optimalnya pelaksanaan dokumen analisa ASN untuk kompetensi	Karena adanya perpindahan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Penyetaraan, sehingga belum membuatnya Analisa Kompetensi untuk Jabatan	Peraturan - peraturan mengenai kompetensi jabatan yang belum terakomodir	Meningkatkan Kompetensi ASN, baik secara kepemimpinan, fungsional, bimbingan, sosialisasi ataupun coaching clinic	Melakukan rencana kebutuhan kompetensi ASN lima tahunan	Masih banyak ASN yang belum memahami tentang pelatihan manajerial, teknis dan fungsional	Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untukikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan	Partisipasi : Rendahnya partisipasi ASN (perempuan) dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan			Perlunya dibuatkan peraturan bupati tentang pengelolaan anggaran satu pintu	Mendahulukan kebutuhan kompetensi ASN, bagi ASN yang naik jenjang, ahli profesi, kepemimpinan, karena berkaitan dengan jabatan yang dipegang		Input : Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : Bkpsdm
 HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
 TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
 VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lemahnya atau kurangnya kompetensi dalam mengelola bagian pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan tinggi, Jabatan fungsional kepemimpinan dan Pta Jabatan	Tambahan Pemeliharaan gedung kantor / fasilitas bagi penyandang disabilitas Kekurangan anggaran dihapuskan
3	kepegawaian Daerah	Pengembangan kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan fungsional ASN	

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, SH, MM		HENDRAWATI	
2	WIDYANTORO, S.Pi		DERISKA AFNI	
3	YEFRIAL, S.H, MM			
4	HILDA ZUSWARNI, SE			

GENDER ANALYSIS PATHWAY

1. Kementerian/Lembaga : **Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Pesisir Selatan**
2. Unit Eselon : **Eselon 2**
3. Program : **Penanggulangan Bencana**
4. Kegiatan : **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
5. Sub Kegiatan : **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**

Tahap I Analisis Kebijakan yang responsif gender					Tahap II Formulasi Kebijakan dan rencana Aksi ke depan		Tahap III Pengukuran hasil	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan & rencana Aksi		Pengukuran hasil	
		Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator gender
PROGRAM Penanggulangan Bencana KEGIATAN Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana SUB KEGIATAN Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Data : Menurut KRB Jenis Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ada 9 Jenis dan Hampir Semua Penduduk terpapar terhadap bencana tersebut. <u>Kapasitas</u> <u>Kemampuan</u> <u>Masyarakat untuk</u> <u>kesiapsiagaan</u> <u>pada dirinya masih</u> <u>rendah.</u> <u>Terutama untuk</u> <u>kaum aparatur</u> <u>perempuannya.</u>	Akses: Ada 50 Nagari yang terletak ditepi pantai sangat rawan terhadap gempa dan tsunami Partisipasi: Partisipasi dan kepedulian dari pemerintahan nagari masih sangat kecil Kontrol: Masih ada OPD yang belum ada peduli terhadap pengurangan risiko bencana	1. Bencana datang tidaklah tentu kapan waktunya. 2. Masyarakat belum merasakan pentingnya pengetahuan tentang bencana. 3. Kaum perempuan selalu dianggap lemah dan tidak dapat untuk mengambil keputusan dalam keluarganya	1. Kabupaten Pesisir Selatan memanjang dan BPBD dan jumlah Staf belum memadai untuk menjangkau daerah yang luas. 2. Jarak antara kabupaten dan Nagari ada sekitar 140 Km 3. Diharapkan aparatur bisa menjadi panutan bagi masyarakatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana. 4. Cara pengelolaan manajemen bencana belum membudaya di	Meningkatkan kemampuan pengolahan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana pada aparatur dikawasan rawan banyak Meningkatkan kualitas aparatur perempuan terhadap pengurangan risiko bencana dalam keluarga Menghasilkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Memetakan data rawan bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota untuk aparatur daerah rawan bencana Mendorong aparatur yang tinggal Mengkoordinasikan antara OPD, Kabupaten/Kota dan internal SKPD, peran serta perguruan tinggi dan stakeholder lainnya. di daerah bencana untuk bisa mendorong dirinya agar bisa	9 Jenis Bencana 232,30 Luas Daerah Tepapar Bencana 433.735 Jiwa yang sudah terdata.	Output: Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Outcome: Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

TUJUAN Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana OUTPUT Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Manfaat: Adanya Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		aparatur dikawasan rawan bencana		menolong dirinya dan masyarakat sekitarnya.		
--	--	---	--	----------------------------------	--	---	--	--



GENDER ANALYSIS PATHWAY

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Kementerian/Lembaga | : | Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Unit Eselon | : | Eselon 2 |
| 3. Program | : | Penanggulangan Bencana |
| 4. Kegiatan | : | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
| 5. Sub Kegiatan | : | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |

Tahap I Analisis Kebijakan yang responsif gender					Tahap II Formulasi Kebijakan dan rencana Aksi ke depan		Tahap III Pengukuran hasil	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan & rencana Aksi		Pengukuran hasil	
		Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan external	Reformulasi tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator gender
PROGRAM Penanggulangan Bencana KEGIATAN Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana SUB KEGIATAN Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam TUJUAN Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Data : Menurut KRB Jenis Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ada 9 Jenis dan Hampir Semua Penduduk terpapar terhadap bencana tersebut. <u>Kapasitas</u> <u>Kemampuan</u> <u>Masyarakat untuk</u> <u>kesiapsiagaan</u> <u>pada dirinya masih</u> <u>rendah.</u> <u>Terutama untuk</u> <u>kaum</u> <u>perempuannya.</u>	Akses: Ada 50 Nagari yang terletak ditepi pantai sangat rawan terhadap gempa dan tsunami Partisipasi: Partisipasi dan kepedulian dari pemerintahan nagari masih sangat kecil Kontrol: Belum Kelompok Siaga Bencana di nagari terbentuk. Manfaat: Tahunya	1. Bencana datang tidaklah tentu kapan waktunya. 2. Masyarakat belum merasakan pentingnya pengetahuan tentang bencana. 3. Kaum perempuan selalu dianggap lemah dan tidak dapat untuk mengambil keputusan dalam keluarganya	1. Kabupaten Pesisir Selatan memanjang dan BPBD dan jumlah Staf belum memadai untuk menjangkau daerah yang luas. 2. Jarak antara kabupaten dan Nagari ada sekitar 140 Km 3. Perempuan yang tinggal di rumah dan bertanggung jawab pada anak balita yang butuh pertolongan masih belum ada pengetahuan bagaimana cara penyelelamatan apabila bencana	Meningkatkan kemampuan pengolahan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana dalam keluarga Meningkatkan kualitas perempuan terhadap pengurangan risiko bencana dalam keluarga Menghasilkan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Memetakan data rawan bencana Sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan terbentuknya keluarga tangguh bencana Mengkoordinasikan antara OPD, Kabupaten/Kota dan internal SKPD, peran serta perguruan tinggi dan stakeholder lainnya. Mendorong Masyarakat untuk menerapkan jiwa sadar terhadap pengurangan	9 Jenis Bencana 232,30 Luas Daerah Tepapar Bencana 433.735 Jiwa yang sudah terdata.	Output: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Outcome: Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

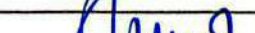
Alam OUTPUT Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		masyarakat dengan mitigasi bencana akan dapat mengurangi risiko yang terdampak		4. terjadi Cara pengelolaan manajemen bencana belum membudaya di Keluarga		risiko bencana terutama didalam keluarganya		
--	--	---	--	---	--	--	--	--


KETUA PELAKSANA
BPBD KAB. PESISIR SELATAN
Ir.H.DOMUSRIZAL,MM
NIP. 1964106 199503 1 001

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : BPBD.
HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Penanggulangan bencana	1. Penguatan Kapasitas Kaum Perempuan dalam Peningkatan Mitigasi Bencana	Sosialisasi komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana - kab / kota.	Pelatihan Kebencanaan thdp ^{kaum Perempuan} OPD 2 OPD organisasi wanita (diibaratkan CAB & BBS) terpisah.
		2/ Keluarga Tangguh Bencana (KATANG). Peran ibu dalam meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana.		Sosialisasi thdp. Rawan Bencana. Kaum Perempuan. Peningkatan Kapasitas Keluarga thdp dlm Pengurangan Risiko Bencana. (diibaratkan CAB & BBS) terpisah
		3/ Peran Guru TK > PAUD dlm meningkatkan Mitigasi dan Kesiap siagaan dlm Pengurangan Risiko Bencana.		Sosialisasi/Pelatihan thdp Guru TK > PAUD kesiap siagaan dlm Pengurangan Risiko Bencana.

NO	NAMA TIM DRIVER	ANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Yunarti. SF. Msi		BPKD (Rifa Linda A)	
2	Sofia Wari - Sol.		BPKD (Syunia wati)	
3	Abdul Hafniz D. SP.			
4	REFA LINDA MYKA			

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$

Catatan :
 utk 2: Berikan dan di
 berikan GAB & BS
 tdkp 3 kegiatan di atas

Perbaikan diterima
Pd dari selang 7/5.2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan: Terpenuhinya fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai	Orang d. Jumlah PNS Laki-laki sebanyak 15 Orang Perempuan 33 Orang e. Bangunan kantor sudah memadai dan baik f. Terdapat satu ruangan ibu menyusui yang belum memadai	Pengurus Barang sesuai dengan kebutuhan PNS Lingkup Badan pengelola Keuangan Daerah - Manfaat: Dalam penggunaan Perlengkapan Gedung Kantor seperti Pendingin ruangan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat memberikan manfaat dalam menunjang Pekerjaan.						Outcome : Terpenuhinya fasilitas kantor yang nyaman dan memadai Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Painan, 16 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIHR SELATAN



HELLEN HASLITA SARI, SE, AK, M.Ec.Dev
NIP. 19780528 200501 2 004

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2024

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM: Pengelolaan Pendapatan Daerah KEGIATAN: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan: Penyelesaian Keberatan Pajak TUJUAN: Penyelesaian Keberatan Pajak	a. UU Nomor 28 /2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah b. PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah c. Perda No 122/ 2011 tentang pajak daerah d. Jumlah WP dan Potensinya e. PBB 158.117WP.	Akses : - Masih kurangnya data, informasi dan layanan serta masih ada kesenjangan dalam mendapatkan perlakuan terhadap layanann keberatan perpajakan Partisipasi : - Tingginya permintaan Wajib Pajak untuk mendapatkan layanan perpajakan tentang keberatan pajak Kontrol: - Tidak adanya keinginan masyarakat yang melaksanakan keterbukaan informasi publik yang mengikut sertakan atau keterlibatan perempuan. Manfaat: - Mampu melaksanakan	- Keterbatasan anggaran - Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi secara elektronifikasi transaksi	- Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik - Penguatan untuk melaksanakan elektronifikasi transaksi Pajak Daerah melibatkan seluruh wajib pajak	- Meningkatkan informasi perpajakan dan retribusi - Efektivitas layanan terhadap Wajib Pajak - Kemudahan Akses data dan Informasi melalui peningkatan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui aplikasi SIMPADEH sehingga pengukuran pajak jelas dan transparan	- Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu menyampaikan informasi pemerintah daerah - Wajib pajak dan Retribusi di seluruh Kab Pessel.	Kegiatan 1: Pengelolaan pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Input: Rp.38.443.688 Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Outcome: Kemudahan layanan dan akses data terhadap informasi Perpajakan dan retribusi Daerah melalui Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. - Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi Transaksi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2024

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Pengelolaan Pendapatan Daerah KEGIATAN: Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah TUJUAN: Terwujudnya Peningkatan PAD melalui Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	a. UU Nomor 28 /2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah b. PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah c. Perda No 122/ 2011 tentang pajakdaerah d. Jumlah WP dan Potensinya. e. PBB 158.117WP.	Akses : - Masih kurangnya data, informasi dan layanan terkait Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data terkait pajak dan retribusi daerah - Masih ada kesenjangan dalam mendapatkan layanan perpajakan daerah. Partisipasi : - Tingginya permintaan Wajib Pajak untuk mendapatkan perlakuan terhadap layanan perpajakan Kontrol: - Tidak adanya keinginan masyarakat yang melaksanakan keterbukaan informasi publik yang mengikutsertakan atau keterlibatan perempuan.	- Keterbatasan anggaran - Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi	- Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik - Penguatan untuk melaksanakan elektronifikasi transaksi Pajak Daerah melibatkan seluruh wajib pajak	- Meningkatkan informasi perpajakan dan retribusi - Efektivitas layanan terhadap Wajib Pajak - Kemudahan Akses data dan Informasi melalui peningkatan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui aplikasi SIMPADEH	- Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu menyampaikan informasi pemerintah daerah - Wajib pajak dan Retribusi diseluruh Kab.Pessel.	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Input: Rp.264.399.103 Output : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Outcome: Kemudahan layanan dan akses data terhadap informasi Perpajakan dan retribusi Daerah melalui Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. - Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi Transaksi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	e. PBB 158.117 WP.	keterbukaan informasi publik yang mengikut sertakan atau keterlibatan perempuan. Manfaat: - Mampu melaksanakan keterbukaan informasi Publik yang bias dipahami, dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat (wajib pajak). Akses : - Semua Wajib pajak dan retribusi daerah						Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. - Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Painan, 16 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIKIR SELATAN



HELLEN MELITA SARI, SE, AK, M.Ec.Dev
NIP. 19780528 200501 2 004

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	e. PBB 158.117 WP.	keterbukaan informasi publik yang mengikut sertakan atau keterlibatan perempuan. Manfaat: - Mampu melaksanakan keterbukaan informasi Publik yang bias dipahami, dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat (wajib pajak). Akses : - Semua Wajib pajak dan retribusi daerah						Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. - Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Painan, 16 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



HERLINA USMETTA SARI, SE, AK, M.Ec.Dev
NIP. 19780528 200501 2 004

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2024

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Pengelolaan Pendapatan Daerah KEGIATAN: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah TUJUAN: Terwujudnya Peningkatan PAD melalui Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	a. UU Nomor 28 /2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah b. PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah c. Perda No 122/ 2011 tentang pajak daerah d. Jumlah WP dan Potensinya.	Akses : - Masih kurangnya data, informasi dan layanan terkait Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data terkait pajak daerah - Masih ada kesenjangan dalam mendapatkan layanan perpajakan daerah. Partisipasi : - Tingginya permintaan Wajib Pajak untuk mendapatkan perlakuan terhadap layanan perpajakan Kontrol: - Tidak adanya keinginan masyarakat yang melaksanakan	- Keterbatasan anggaran - Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak daerah	- Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik - Penguatan untuk melaksanakan elektronifikasi transaksi Pajak Daerah melibatkan seluruh wajib pajak	- Meningkatkan informasi perpajakan dan retribusi - Efektivitas layanan terhadap Wajib Pajak - Kemudahan Akses data dan Informasi melalui peningkatan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui aplikasi SIMPADEH	- Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu menyampaikan informasi pemerintah daerah - Wajib pajak diseluruh Kab.Pessel.	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Input: Rp.54.040.364 Output : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Outcome :Kemudahan layanan dan akses data terhadap informasi Perpajakan Daerah melalui

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	a. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kantor baru yang berdiri pada tahun 2021 b. Luas Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 2.400 M2. c. Jumlah PNS Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 50	- Akses: Masih Kurangnya Fasilitas atau perlengkapan yang memadai pada Gedung Kantor BPKPAD yang sesuai dengan Standar. - Partisipasi : - Kondisi gedung kantor yang bertingkat dan terdapatnya pintu pelayanan yang berada di Lt 2 sehingga Pada tangga yang sudah ada, pegangan tangga harus disediakan. - perlu disediakan fasilitas ruangan ibu menyusui dan ruang bermain anak yang memadai - Banyaknya layanan masyarakat yang dilayani di Kantor perlu disediakan tempat duduk khusus disabilitas sehingga memudahkan masyarakat disabilitas untuk urusan di kantor - Kontrol: Dalam Penyaluran penggunaan Perlengkapan kantor diketahui oleh Pejabat Penelausahaan Barang dan	Terdapatnya Keterbatasan Anggaran dalam Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya seperti Pemeliharaan ruangan ibu menyusui dan tempat bermain anak sehingga memadai serta tempat khusus pelayanan disabilitas	- Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang nyaman dan Memadai.	- Terpenuhinya Pemeliharaan Kantor yang memadai Seperti prgangan tangga, pemeliharaan ruangan ibu menyusui dan tempat bermain anak yang memadai serta tempat khusus untuk disabilitas	- Pemeliharaan Gedung Kantor yaitu Pemeliharaan ruangan ibu menyusui sehingga memadai - Menyediakan tempat bermain anak - Menyediakan pegangan tangga - Menyediakan tempat khusus untuk disabilitas	Menambah Fasilitas Perlengkapan Gedung Kantor Lingkup BPKPAD Jumlah PNS Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 50 Orang Jumlah PNS Laki-laki sebanyak 15 Orang Perempuan 35 Orang	- Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Input: Rp. 308.075.000 - Output: Pemeliharaan Ruang Ibu Menyusui dan tempat bermain anak yang memadai serta tempat khusus disabilitas

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2024

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Pengelolaan Pendapatan Daerah KEGIATAN: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah TUJUAN: Terwujudnya Peningkatan PAD melalui Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	a. UU Nomor 28 /2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah b. PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah c. Perda No 122/ 2011 tentang pajak daerah d. Jumlah WP dan Potensinya.	Akses : - Masih kurangnya data, informasi dan layanan terkait Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data terkait pajak daerah - Masih ada kesenjangan dalam mendapatkan layanan perpajakan daerah. Partisipasi : - Tingginya permintaan Wajib Pajak untuk mendapatkan perlakuan terhadap layanan perpajakan Kontrol: - Tidak adanya keinginan masyarakat yang melaksanakan	- Keterbatasan anggaran - Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak daerah	- Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik - Penguatan untuk melaksanakan elektronifikasi transaksi Pajak Daerah melibatkan seluruh wajib pajak	- Meningkatkan informasi perpajakan dan retribusi - Efektivitas layanan terhadap Wajib Pajak - Kemudahan Akses data dan Informasi melalui peningkatan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui aplikasi SIMPADEH	- Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu menyampaikan informasi pemerintah daerah - Wajib pajak Kab.Pessel.	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Input: Rp.54.040.364 Output : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Outcome : Kemudahan layanan dan akses data terhadap informasi Perpajakan Daerah melalui

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		keterbukaan informasi Publik yang bias dipahami, dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat (wajib pajak). Akses : - Semua Wajib pajak dan retribusi daerah						Pemerintah Daerah

Painan, 16 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



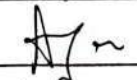
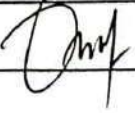
HELEN HASMIETA SARI, SE, AK, M.Ec.Dev

NIP. 19780528 200501 2 004

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : BPKPAD
HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Penambahan toilet 1 ek ^a dan perembanan agar seimbang
2	Pengelola Pendapatan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Pajak Pemerintah Kab/ kota	Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
3	Pengelolaan pendapatan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Pajak Pemerintah kab/ kota	Pelaporan dan konsultasi Pajak Daerah.	

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMBA, SH, MM		Pahayu Kurnia Putri	
2	YERIAL, SH, MM		ISRA HAYAT	
3	HILDA ZUSWANI, SE			
4	WIDYAPTORO, S. Pi			

Tujuan: Setiap Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar.	Laki-laki ; 236.116 jiwa dan Perempuan ; 239.959 jiwa Jumlah Balita : 42.708 orang Laki-laki : 21.462 orang Perempuan : 21.246 orang Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan : 3.036 orang (100% SPM)	pentingnya pemeriksaan kesehatan masih kurang	tugas rangkap 4. Promosi ke masyarakat yang masih kurang			petugas tentang Pelayanan Kesehatan pada Balita 4. Sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Kesehatan pada Balita		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Painan, 17 Mei 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP.197011042000121001

Format 1
Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengelola Pelayanan Kesehatan penderita ODGJ	Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jumlah : Penduduk (2021) 476.075 jiwa	Sarana dan Prasarana: Sarana prasarana belum sesuai kebutuhan SDM : Tenaga yang belum sesuai kebutuhan sehingga masih banyak petugas yang bertugas rangkap Masyarakat: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang	1. Sarana Prasarana di Puskesmas kurang lengkap 2. Kurangnya pelatihan petugas dalam penanganan penderita ODGJ 3. Pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai 4. Promosi yang kurang kepada masyarakat tentang	1. Kurangnya koordinasi dengan lintas sector spt. Wali Nagari dan Dinas terkait tentang pelayanan kesehatan serta rujukan kesehatan pada ODGJ 2. Penanganan pada penderita ODGJ belum responsif gender	Setiap penderita ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Melengkapi sarana prasarana (Alkes dan Obat) sesuai kebutuhan Puskesmas 2. Melakukan Pelatihan ke petugas serta Sosialisasi ke masyarakat tentang pelayanan kesehatan pada ODGJ 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector spt. Wali Nagari dan Dinas terkait mengenai pelayanan kesehatan dan	Penderita ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar: 100% (SPM)	Input : Rencana Aksi 1 : Rp.155.000.000,- Output : 100% penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan dan sistem rujukan kesehatan yang responsive gender pada ODGJ

Format 1
Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jumlah : Penduduk (2022) 476.075 jiwa Laki-laki ; 236.116 jiwa dan Perempuan ; 239.959 jiwa	Sarana dan Prasarana: Sarana Prasarana belum memadai untuk pemeriksaan pada ibu bersalin SDM : Dokter/Dokter Spesialis terbatas di Puskesmas/belum sesuai kebutuhan, Bidan belum semua ada di Pustu/Poskesri Bidan, Dokter/Dokter Spesialis belum semua memiliki	1. Keterbatasan sarana prasarana dalam pemeriksaan Ibu Bersalin (spt : tensimeter, pemeriksaan laboratorium, USG, dll) 2. Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal belum Optimal 3. Masih banyak petugas yang belum memiliki pelatihan ter-update	1. Ibu bersalin yang mendapat pelayanan di luar wilayah fasyankes kadang tidak dilaporkan 2. Koordinasi dengan lintas sector yang kurang tentang pentingnya sarana prasarana pelayanan kesehatan terhadap ibu bersalin 3. Tingkat ekonomi keluarga	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1. Melengkapi SDM Kesehatan serta Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan (Alkes dan Obat) untuk ibu bersalin sesuai standar di Puskesmas dan Pustu 2. Bimtek dan Pelatihan ter-update bagi petugas tentang Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 3. Melaksanakan pertemuan lintas program dan tatalaksana Ibu Bersalin serta Monev Program KIA 4. Meningkatkan pelayanan sistem rujukan secara terpadu dan berkesinambungan	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2022: 144/100.000 KH (12 Org)	Input : Rencana Aksi 1 : Rp.270.000.000,- Output : 100% ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standard Outcome : Terjadinya penurunan angka kematian ibu

Format 1
Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jumlah : Penduduk (2022) 476.075 jiwa	Sarana dan Prasarana: Sarana prasarana Tidak memadai untuk pelayanan kesehatan Balita belum sesuai standar SDM : Beban kerja petugas yang besar Masyarakat: Pemahaman masyarakat tentang	1. Sarana Prasarana untuk melakukan pelayanan kesehatan balita belum memadai (spt: Posyandu Kit) 2. Pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai 3. Petugas Kesehatan yang masih mempunyai	1. Koordinasi dengan lintas sector tentang pentingnya pelayanan kesehatan balita masih kurang 2. Dukungan lintas program/lintas sector belum maksimal 3. Kepedulian masyarakat tentang pemeriksaan kesehatan masih kurang	Setiap Balita (0-59 bulan) mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1. Melakukan pendataan sasaran dan pemeriksaan kesehatan Balita dalam rangka pencegahan stunting dan kesakitan pada Balita 2. Melengkapi sarana prasarana (spt: Posyandu Kit, Obat dan Vaksin) pada Puskesmas dan Pustu 3. Melakukan Bimtek, Pelatihan dan Monev ke	Balita yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar : 3.036 orang (100% SPM)	Input : Rencana Aksi 1 : Rp.227.000.000,- Output : 100% Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standard Outcome : Penurunan Stunting dan angka kesakitan pada balita, Meningkatnya cakupan Imunisasi Dasar pada Balita

Tujuan: Setiap Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar oleh Tenaga Kesehatan (bidan, dokter, SpOG yang memiliki STR)	Jumlah ibu hamil : 9.560 jiwa Bayi lahir laki-laki : 4.098 jiwa perempuan : 4.097 jiwa Rasio RS 1 : 100.000 pdkk RS yang ada 3 unit, RS khusus 1 unit, kurang 1 unit AKI tahun 2022 : 144 / 100.000 KH (120. org) Jumlah Kelahiran Hidup 8.691 jiwa	STR yang aktif Masyarakat : Kurangnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya ibu bersalin memeriksakan diri ke Tenaga Kesehatan, Tidak semua ibu berperan dalam pengambilan keputusan mengenai proses persalinannya	tentang kegawat daruratan maternal neonatal	rendah, sehingga ibu bersalin kurang memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan ke Tenaga Kesehatan 4. Budaya dimasyarakat yang membuat ibu sulit mengambil keputusan mengenai persalinannya				
--	--	---	---	---	--	--	--	--

Painan, 17 Mei 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



dr. H.SYAHRIZAL ANTONI,SY.MPH
NIP.197011042000121001

(Orang Dengan Gangguan Jiwa)	Laki-laki ; 236.116 jiwa dan Perempuan ; 239.959 jiwa	pemeriksaan kesehatan pada ODGJ	pentingnya pemeriksaan kesehatan pada penderita ODGJ			rujukan kesehatan pada penderita ODGJ		
Tujuan: Setiap penderita ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah penderita ODGJ yang dilakukan pemeriksaan : 1.000 orang Laki-laki : 496 orang Perempuan : 504 orang		5. Pelayanan Kesehatan pada ODGJ belum memperhatikan kebutuhan penderita berdasarkan gendernya			4. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang responsif gender terhadap penderita ODGJ		

Painan, 17 Mei 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



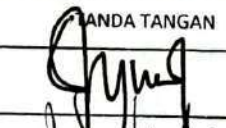
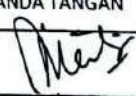
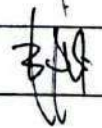
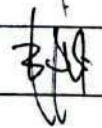
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP.197011042000121001

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD
HARI/TANGGAL
TEMPAT
VERIFIKASI

: Dn KES.
: Selasa/16 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kes. Masyarakat.	Penyediaan Pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Rujukan Tle Dnere. ODEJ. Kab / kota	Pengelola Pelayanan kesehatan Penderita ODEJ.	1/ Rencana aksi & Ringkas sesuai dgn. Prasarat dlm pelaksanaan yg dilaksanakan thdp ODG. dgn Rencana Anggaran Rp.151.000.000. -
2	Program Pemenuhan Upaya Kes. Perorangan dan Upaya Kes. Mas.	Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Kec.UTE UKM. Kec. Pd Org ds Gangguan. Dan. UKP Rujukan Tle Dnere. Jawa Barat. Kab. Kota.	Pengelola Pelayanan Kec. Pd Org ds Gangguan. Jawa Barat.	2/ Rencana Aksi & Ringkas sesuai dgn Prasarat dlm pelaksanaan yg dilaksanakan
3	Program Pemenuhan Upaya Kes. Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Pemediaan Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan TK Daerah Kabupaten/kota	Pengelola Pelayanan kesehatan Pd orang dengan gangguan jiwa berat	3/ Lebih terfokus pd Pelayan. Strategi. jurnal konflik yg mendapatkan Pelayan. Kesehatan sesuai Strategi. & kembalikan Perbaikan Pd Selasa 17/5-2023.

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Yonarti SE MSi		Meliana syopiani	
2	Syofianeri ST.			
3	Irena Yulia			
4	Abdul Hamid			



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad.Hatta - Painan

Painan, 19 Mei 2023

Nomor : 460/611 /DPP-PS/V/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengiriman perbaikan hasil
verifikasi GAP dan GBS Tahun
2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Di
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya verifikasi GAP dan GBS Tahun 2024, dengan ini kami kirimkan perbaikan hasil verifikasi GAB dan GBS Dinas Perikanan dan Pangan (Berkas terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan bahan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

FIRDAUS, S.Pi

NIP 19700621 199303 1 006

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kabijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KEGIATAN: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BENTUK KEGIATAN: Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) oleh Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan dan Menurunkan Angka Prevelansi Balita Stunting pada Kabupaten Pesisir Selatan TUJUAN: Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Akan pentingnya mengkonsumsi ikan	- Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah yakni hanya 44,77 kilogram per kapita - Angka Prevelansi Balita Stunting pada Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 yakni 29,8% - Rendahnya konsumsi ikan ini karena Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan rendah. - Gerakan masyarakat makan ikan ini bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk anak sekolah.	Akses : - Gemarikan ini hanya diikuti oleh orang dewasa tidak dengan anak Partisipasi : - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan Kontrol: - Masih kurangnya gemarikan yang dilakukan selama ini Manfaat: - Kesadaran masyarakat akan makan ikan ini masih rendah	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) oleh Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan dan Menurunkan Angka Prevelansi Balita Stunting pada Kabupaten Pesisir Selatan	- Ada anggapan bahwa Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) ini tidak penting. - Dalam gemarikan ini tidak pernah melibatkan anak-anak sekolah	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan	- Sosialisasi tentang gemar makan ikan (Gemarikan) dengan melibatkan anak sekolah - Lomba Masak Serba Ikan pada Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi ikan masih rendah sehingga menyebabkan IQ masyarakat masih rendah	Input: Tersedianya Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta) Output : Peningkatan Angka Konsumsi Ikan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi gemar makan ikan, lomba masak Masak Serba Ikan pada Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Outcome : - Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan - Menumbuhkan kesadaran pentingnya makan ikan dikalangan masyarakat untuk memperbaiki gizi keluarga secara umum untuk pencegahan dan penanganan balita stunting Dampak - Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) dari 44,77 (Thn 2022) menjadi 44,82 (Thn 2023) - Menurunnya Prevelansi Balita Stunting dari 29,8% menjadi 14%

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Program Penanganan Kerawanan Pangan KEGIATAN: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota BENTUK KEGIATAN: Pemberian Paket Sembako pada Balita Stunting dan pemberian Bibit tanaman pada kelompok tani dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Menurunkan Angka Prevelansi Balita Stunting pada Kabupaten Pesisir Selatan TUJUAN: - Meningkatkan Nagari Mandiri Pangan Kabupaten Pesisir Selatan - Menurunkan Prevelansi Balita Stunting Stunting Kabupaten Pesisir Selatan - Meningkatkan penanganan daerah rawan bencana	Nagari Mandiri Pangan pada Tahun 2022 baru 9 Nagari ((36,56% Thn 2022) dari target 25 NaGari pada tahun 2023 sebanyak 11 Nagari (44,67%) Angka Prevelansi Balita Stunting pada Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 yakni 29,8% sementara target nasional sebesar 14% Masih rendahnya kemampuan daerah untuk penanggulangan bencana di mana Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia baru 63,5 ton dari target minimal 100 ton. Nagari belum menyadari betapa besarnya peranan Nagari dalam penanganan Kerwanan Pangan untuk peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga	Akses : Nagari belum memahami penanganan kerawanan merupakan tugas penting untuk peningkatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting Partisipasi : Rendahnya kesadaran nagari dalam pemanfaatan anggaran untuk penanganan kerwanan pangan Kontrol: Masih kurangnya perhatian dari pemerintah nagari tentang pemanfaatan dana nagari Manfaat: - Kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan dalam peningkatan ketahanan pangan tingkat RT	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam penanganan bencana dan Menurunkan Angka Prevelansi Balita Stunting pada Kabupaten Pesisir Selatan	Ada anggapan bahwa penanganan kerawanan pangan hanya tugas dari Dinas Perikanan dan Pangan padahal anggaran Nagari sebesar 20% dana ADD bisa dimanfaatkan untuk penanganan kerawanan pangan tersebut Dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan anggaran nagari tersebut melibatkan Dinas Perikanan dan Pangan serta PPL setempat	Menumbuhkan kesadaran pemerintah nagari agar pemanfaatan dana nagari untuk ketahanan pangan benar – benar sesuai dengan tujuan peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dan meningkatkan jumlah nagari yang mandiri pangan	Sosialisasi melalui PPL terkait penyusunan kegiatan dana nagari untuk pemanfaatan pekarangan Pemberian bantuan paket sembako untuk penanganan balita stunting Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah di lokasi bencana, dan daerah dengan balita gangguan gizi	Koordinasi yang terbangun antara Dinas Perikanan dan Pangan dengan Nagari dalam penanganan Kerwanan Pangan untuk pemanfaatan Daana Nagari	Input: Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) , Penanganan Kerawanan Pangan Rp.300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah) Output : Peningkatan jumlah Nagari Mandiri Pangan , menurunnya Angka Stunting dan tertanganinya daerah terdampak bencana Outcome : - Meningkatnya rumah tangga mandiri pangan - terpenuhinya kebutuhan sembako dalam penanganan balita stunting - terpenuhinya kebutuhan cadangan pangan di daerah rawan bencana dan balita gangguan gizi. Dampak - Meningkatnya Nagari Mandiri Pangan dari 9 Nagari (36,56% Thn 2022) menjadi 11 Nagari (44,67% Thn 2023) - Menurunnya Prevelansi Balita Stunting Stunting dari 29,8% menjadi 14%

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD:Dinas Perikanan dan Pangan Kab.Pesisir Selatan

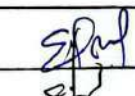
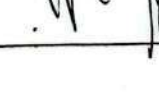
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan Budidaya KEGIATAN : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota TUJUAN : - Meningkatkan produksi perikanan budidaya - Meningkatkan produksi benih ikan Pelaku Usaha UPR - Meningkatkan Pendapatan Pembudidaya - Meningkatkan produksi pakan ikan	- Jumlah Pembudidaya ikan di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 1.938 tergabung dalam 156 Pokdakan - Jumlah UPR 12, 1 BBI dengan produksi benih 5.830.750 pertahun - Potensi 1.720 ha - Realisasi 533 ha	Akses : - Masih kurangnya Pokdakan/UPR di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mempunyai badan hukum - Kurangnya informasi dan pengetahuan perempuan terhadap budidaya ikan - Jarak rumah dengan lokasi budidaya Partisipasi : - Masih kurangnya peran serta perempuan pembudidaya yang ikut di dalam Pokdakan dan UPR - Kurangnya Dukungan Kepala Keluarga atau Suami dalam berorganisasi atau berkelompok - Masih ada anggapan pekerjaan pembudidaya ikan kurang pantas dikerjakan oleh perempuan Kontrol - Rendahnya inisiatif dari perempuan untuk bergabung di dalam Pokdakan/UPR Manfaat - Nilai manfaat berbudidaya kurang dirasakan perempuan	- Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pembudidaya, khususnya perempuan di kabupaten Pesisir Selatan	- Pekerjaan pem-budidaya ikan berkonotasi kasar, cenderung dikerjakan laki-laki - Secara Budaya pekerjaan pembudidaya ikan kurang pantas dikerjakan oleh perempuan	- Meningkatkan produksi perikanan budidaya - Meningkatkan Pendapatan Pembudidaya	- Melakukan Pelatihan kepada Pokdakan dan UPR - Memberikan sarana dan prasarana kepada Pokdakan dan UPR	- Masih tersedia lahan yang belum dimanfaatkan seluas 1.187 ha - Masih kurangnya peran serta perempuan pembudidaya yang ikut di dalam Pokdakan dan UPR - Kurangnya Dukungan Kepala Keluarga atau Suami dalam berorganisasi atau berkelompok - Masih ada anggapan pekerjaan pembudidaya ikan kurang pantas dikerjakan oleh perempuan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Input : Alokasi Dana tahun yang bersangkutan Output : - Jumlah Paket Bantuan sarana dan prasana perikanan budidaya - Jumlah pembudidaya yang memperoleh pelatihan dan pembinaan Outcome : - Sertifikat CPIB dan CBI/B sebagai legalitas pembudidaya (pembenihan dan pembesaran ikan) - Jumlah pembudidaya meningkatnya pembudidaya ikan yang mandiri

OPD
HARI/TANGGAL
TEMPAT
VERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

: Perikanan & Pangan
: Selasa/16 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
13	Program Penguatan Kerangka Pangan	Pembuatan Paket Lembar pd Berlitz Story dan Pembacaan bibit tanaman pd Kolom pd. tani & peng. Lora Peras cadangan Pangan.	Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	1/ Mengkaji Perasi pd Rencana Aksi. 2/ Out come mengarah ke RsmL tuda (mendari Rungan Mewngkat kemandirian Pangan dan ketahanan RsmL taggu. 3/ Cadangan Rencana Aksi n-ranbung dgn Out come yang menyambung dgn dan ketersediaan Anggaran.
2.	Pengelolaan Perikanan tangkap	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota	Pengembangan kapasitas Nelayan kecil.	Perbaikan di terima. Selasa 17/5-2023.

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Wunarti. S. Msi		EDA. PUTRI SANTI	
2	Syofianeri. S.		Reni Gusanti	
3	Agus! Harnis SP			
4	Irma Julia			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas : Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tujuan Meningkatnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sebanyak 7 unit 2. Jumlah Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari 3. Jumlah Tenaga Medik Veteriner sebanyak 8 orang 4. Jumlah Tenaga Para Medik Veteriner sebanyak 16 orang 5. Jumlah populasi anjing sebanyak 26.683 ekor 6. Kejadian gigitan oleh hewan pembawa rabies sebanyak 155 kasus	1. Aspek Akses Terbatasnya akses Petugas Medik Veteriner dan Para Medik Veteriner terhadap pemilik hewan/ternak dikarenakan sebagian besar Petugas Medik Veteriner dan Para Medik Veteriner merangkap beberapa Wilayah Kerja yang meliputi beberapa Nagari bahkan kecamatan 2. Aspek Partisipasi Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penyakit hewan dan zoonosis 3. Aspek Control Penambahan jumlah tenaga medik dan para medik veteriner	1. Masih kurangnya Tenaga Medik Veteriner dan para medik veteriner 2. Tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner masih didominasi oleh laki-laki 3. Minimnya fasilitas penyidikan dan pengujian penyakit rabies dan bangunan laboratorium rabies	1. Rendahnya kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam melaporkan kasus penyakit hewan dan zoonosis 2. Hewan pembawa rabies masih berkeliruan bebas dilingkungan tempat tinggal masyarakat	Menurunnya penyakit hewan dan zoonosis	1. Pelatihan Kader Kesehatan Hewan Nagari 2. Pelatihan petugas medis dan paramedis veteriner 3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang ramah Disabilitas dan Lansia pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	1. Jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sebanyak 7 unit 2. Jumlah Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari 3. Jumlah Tenaga Medik Veteriner sebanyak 8 orang 4. Jumlah Tenaga Para Medik Veteriner sebanyak 16 orang 5. Jumlah populasi anjing sebanyak 26.683 ekor 6. Kejadian gigitan oleh hewan pembawa rabies sebanyak 155 kasus	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Input : Rp. 605.000.000,- Output : Menurunnya penyakit hewan dan zoonosis Outcomes/manfaat : 1. Terlatihnya Kader Kesehatan Hewan Nagari 2. Terlatihnya petugas medis dan paramedis veteriner 3. Tersedianya sarana dan prasarana

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		terhadap pentingnya pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani yang telah dibangun						

Painan, 17 Mei 2023
Kepala Dinas,


MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200301 1 009

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		4. Dari aspek manfaat: Kurang nya kesadaran/respon kader kesehatan hewan nagari tentang pelatihan yang telah diberikan						penunjang yang ramah Disabilitas dan Lansia pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

Paman, 17 Mei 2023
Kepala Dinas,

MADRIANTO, S. Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
								2. Meningkatnya persentase ternak sapi potong unggul

Painan, 17 Mei 2023

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S. Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas : Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Tujuan : Meningkatnya produksi daging sapi potong	1. Jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sebanyak 7 unit 2. Jumlah Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari 3. Jumlah petugas inseminator sebanyak 29 orang 4. Jumlah populasi sapi sebanyak 86.630 ekor 5. Jumlah angka kelahiran sapi potong sebanyak 22.150 ekor 6. Jumlah angka kelahiran sapi potong hasil inseminasi buatan (IB) sebanyak 6.050 ekor	1. Aspek Akses Terbatasnya akses Petugas Inseminator terhadap Peternak/Kelompok Tani karena wilayah kerja yang cukup luas 2. Aspek Partisipasi Kurangnya dan keterlambatan Informasi yang diberikan oleh Peternak/Kelompok Tani kepada Petugas Inseminator tentang kondisi ternaknya 3. Aspek Control Penambahan jumlah Petugas Inseminator (IB) 4. Dari aspek manfaat: Sulitnya akses terhadap Peternak/Kelompok Tani menyebabkan pelayanan yang diberikan belum maksimal	1. Masih Kurangnya Petugas Inseminator (IB) 2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Petugas Inseminator (IB)	1. Lokasi Peternak/ Kelompok Tani jauh dari lokasi tempat tinggal Petugas Inseminator 2. Banyaknya jumlah ternak yang harus dilayani 3. Pelayanan inseminasi buatan (IB) tergantung masa birahi ternak, jika pelayanan IB harus dilakukan malam hari akan menyulitkan Petugas Inseminator Perempuan untuk melaksanakannya	Meningkatnya jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	1. Pendidikan dan Latihan Petugas Inseminasi Buatan (IB) 2. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	1. Jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sebanyak 7 unit 2. Jumlah Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari 3. Jumlah petugas inseminator sebanyak 29 orang 4. Jumlah populasi sapi sebanyak 86.630 ekor 5. Jumlah angka kelahiran sapi potong sebanyak 22.150 ekor 6. Jumlah angka kelahiran sapi potong hasil inseminasi buatan (IB) sebanyak 6.050 ekor	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Input : Rp. 665.682.000,- Output : Meningkatnya populasi ternak sapi potong Outcomes/manfaat : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Inseminator (IB)

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas : Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tujuan : Meningkatkan produksi pertanian	1. Luas Sawah beririgasi seluas 17.721,17 Ha 2. Luas Sawah Pasang Surut seluas 39,00 Ha 3. Luas Sawah Tadah Hujan seluas 6.072,92 Ha 4. Luas Sawah Lebak seluas 52,00 Ha 5. Luas Sawah Total seluas 23.885,09 Ha 6. Jumlah Produksi Padi sebanyak 156.430,34 Ton 7. Jumlah Produksi Jagung sebanyak 208.010,56 Ton 8. Perda LP2B	1. Aspek Akses Adanya keterbatasan akses dalam kontrol kondisi jaringan irigasi dikarenakan lokasi jaringan irigasi yang jauh dari pemukiman penduduk/petani 2. Aspek Partisipasi Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara jaringan irigasi yang telah dibangun/direhabilitasi 3. Aspek Control Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi tersier 4. Dari aspek manfaat: Kurangnya kesadaran masyarakat	1. Masih belum validnya data tentang kondisi jaringan irigasi tersier di lapangan	1. Pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani sering terkendala 2. Pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang telah dibangun sering diabaikan oleh masyarakat penerima manfaat 3. Sering terjadinya bencana alam sehingga dapat merusak jaringan irigasi tersier 4. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier masih sangat rendah	Meningkatnya produksi pertanian	1. Keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2. Sosialisasi/ Pelatihan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) mengenai Pemetaan Skema Jaringan Irigasi Tersier	1. Luas Sawah beririgasi seluas 17.721,17 Ha 2. Luas Sawah Pasang Surut seluas 39,00 Ha 3. Luas Sawah Tadah Hujan seluas 6.072,92 Ha 4. Luas Sawah Lebak seluas 52,00 Ha 5. Luas Sawah Total seluas 23.885,09 Ha 6. Jumlah Produksi Padi sebanyak 156.430,34 Ton 7. Jumlah Produksi Jagung sebanyak 208.010,56 Ton 8. Perda LP2B	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Input : Rp. 3.388.000.000,- Output : Meningkatnya indeks pertanaman Outcomes/manfaat : 1. Meningkatnya luas tanam dan panen padi sawah 2. Tersedianya peta skema Jaringan Irigasi Tersier

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : Pertanian.
 HARI/TANGGAL : Rabu/17 Mei 2023
 TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
 VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Pembangunan Prasarana Pertanian.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Usaha Tani	Peringkasan Rencana Aksi yg menyangkut dengan Hasil / outcome.
2	Penyediaan dan Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Pengawasan Peredaran Gagal Sarana Pertanian Penyediaan & Peredaran Benih / bibit Ternak & Hijauan Pakan Ternak dan Obat Ternak.	Pembangunan Prasarana Pertanian.	Pembangunan Rehabilitasi - Pelatihan tenaga medis dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani	Rencana Aksi pd Narasinya di perbaiki di sesuaikan dengan menyangkut dgn. output & outcomenya.
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Pembangunan Prasarana Pertanian.	Pembangunan Rehabilitasi - Pelatihan tenaga medis dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani	- Rekomendasi Sarpras UTG Laboratorium dan Sarpras Disabilitas & Lansia. Narasi di sesuaikan dgn. relevansi.

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Nurhanti SE. MSi.		Meldian Yusuf	
2	Syofianeri. SH.		Fitri Ayu	
3	Irmayulia S.Kom. MM.			
4	Abdel Hamid			

Catatan : Pertanian di P
 Cikan per Kamis 18/5-2023

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program :	Data terpilah :	Akses :						Input :
Pengelolaan Pendidikan	Jumlah pendidik yang mengikuti bimtek : 640 org	Sebagian besar Guru SD yang akan melatih peserta siswa OSN belum mengikuti Bimtek	- Pimpinan dalam pemerataan penempatan guru masih kurang optimal;	Terbatasnya kemampuan Akademis Guru dalam membimbing siswa peserta OSN	Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten	Melaksanakan bimtek bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pendidik yang mengikuti bimtek : 640 org	Dana : Rp. 809,000,000
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta : Guru Laki-laki : 160 org, Guru Perempuan : 480 org						Jumlah Peserta : Guru Laki-laki : 160 org	Output : Terlatihnya tenaga pendidik tahun 2023, Guru perempuan : 480 org, dan guru laki-laki : 160 org
Sub Kegiatan :								
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru SD di Kab. Pessel = 5,048 terdiri dari Guru Perempuan 3,848 dan Laki-Laki 1,200	Partisipasi : Masih ada Guru SD dalam mendampingi peserta OSN yang belum maksimal					Guru Perempuan 480 org Jumlah Guru SD di Kab. Pessel = 5,048 terdiri dari Guru Perempuan 3,848 dan Laki-Laki 1,200	
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten	Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 4,408	Kontrol : kurangnya fasilitas dari Dinas untuk melaksanakan bimtek		Masih kurangnya kemauan Guru untuk mengikuti pelatihan			Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 4,408	Outcome: Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten
		Manfaat : Belum maksimalnya Guru SD dalam menerima pelatihan bimtek untuk mendampingi anak						Hasil :

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TAHUN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program :	Data terpilih :	Akses						Input :
Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah SMP : 79 sekolah	- Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air bersih dan sarana sanitasi	Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki	Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/ mengusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender	Meningkatnya Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	-Pembangunan sarana air bersih dan sarana sanitasi di seluruh sekolah	Jumlah Sekolah SMP : 79 (Jumlah SMP yang telah difasilitasi sanitasi: 128 sekolah)	Dana Rp 4.048,300.900,-
Kegiatan :	Jumlah Siswa : 17,145	Partisipasi :				-Sosialisasi ke pada Kepala Sekolah tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya sanitasi/wc	Jumlah Siswa : 17,145	Output :
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa SMP Laki-laki : 8.633 Siswa SMP Perempuan : 8,512 Org	Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi		Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender			Siswa SMP Laki-laki : 8.633, Siswa SMP Perempuan : 8,512 Org	Terbangunnya Kebutuhan air bersih dan Sanitasi
Sub Kegiatan :		Kontrol :					Jumlah SMP yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 153 unit	Outcome: Terpenuhiya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kurangnya pengawasan oleh dinas dan sekolah akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi						

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program :	Data terpilih :	Akses						Input :
Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah SMP : 79 sekolah	• Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air bersih dan sarana sanitasi	Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki	Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/ mengusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender	Memingkatkan Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	-Pembangunan sarana air bersih dan sarana sanitasi di seluruh sekolah	Jumlah Sekolah SMP : 79 (Jumlah SMP yang telah difasilitasi sanitasi: 128 sekolah)	Dana Rp 4,048,300,900,-
Kegiatan :	Jumlah Siswa : 17,145	Partisipasi :				-Sosialisasi ke pada Kepala Sekolah	Jumlah Siswa : 17,145	Output :
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa SMP Laki-laki : 8,633. Siswa SMP Perempuan : 8,512 Org	Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi		Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender		tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya sanitasi/wc	Siswa SMP Laki-laki : 8,633, Siswa SMP Perempuan : 8,512 Org	Terbangunnya Kebutuhan air bersih dan Sanitasi
Sub Kegiatan :		Kontrol :						Outcome:
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kurangnya pengawasan oleh dinas dan sekolah akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi					Jumlah SMP yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 153 unit	Terperuhnya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan

								Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten
--	--	--	--	--	--	--	--	--

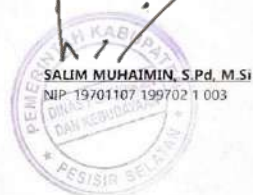
Painan, 22 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Tujuan : Meningkatnya Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	Jumlah SMP yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 153 unit, WC laki-laki = 73 unit dan WC Perempuan = 80 unit (Jumlah SMP yang telah difasilitasi sarana air bersih: 128 sekolah)	Manfaat : Fasilitas air bersih dan sanitasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan siswa				Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SMP	WC laki-laki = 73 unit, WC Perempuan = 80 unit	Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak
--	---	---	--	--	--	--	--	--

Paiman, 22 Mei 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan Dan Rencana		Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program :	Data terpilih :	Akses	Kuranginya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki	Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/ mengusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender	Meningkatnya Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	- Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di seluruh sekolah	Jumlah Sekolah SD : 404 (Jumlah SD yang telah difasilitasi sanitasi: 277 sekolah)	Input :
Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD : 404 sekolah	- Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air bersih dan sarana sanitasi						Dana : Rp.1,943,857,064,-
Kegiatan :	Jumlah Siswa : 54,383	Partisipasi :					Jumlah Siswa : 54,383	Output :
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Siswa SD Laki-laki : 28,562 dan Siswa Perempuan : 25,821 org	Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi		Kuranginya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender		- Sosialisasi ke pada Kepala Sekolah tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya sanitasi/wc	Siswa SD Laki-laki : 28,562 dan Siswa Perempuan : 25,821 org	Terbangunnya Kebutuhan air bersih dan Sanitasi
Sub Kegiatan :		Kontrol :						Outcome:
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Siswa SD Laki-laki : 28,562 dan Siswa Perempuan : 25,821 org	Kuranginya pengawasan oleh dinas dan sekolah akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi					Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 441 unit	Terpenuhinya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan

Tujuan : Meningkatkan Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	Jumlah SMP yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 153 unit , WC laki-laki = 73 unit dan WC Perempuan = 80 unit (Jumlah SMP yang telah difasilitasi sarana air bersih: 128 sekolah)	Manfaat : Fasilitas air bersih dan sanitasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan siswa				Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SMP	WC laki-laki = 73 unit, WC Perempuan = 80 unit	Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Paiman, 22 Mei 2023
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si
 NIP. 19701107 199702 1 003

Tujuan : Meningkatnya Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 441 unit , WC laki-laki = 240 unit dan WC Perempuan = 201 unit (Jumlah SD yang telah difasilitasi sarana air bersih: 277 sekolah)	Manfaat : Fasilitas air bersih dan sanitasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan siswa				- Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	WC laki-laki = 240 unit, WC Perempuan = 201 unit	Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak
--	--	---	--	--	--	---	--	--

Painan, 22 Mei 2023
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si
 NIP. 19701107 199702 1 003

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Ke Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	5. Jumlah Penduduk yang belum memiliki KTP el sebanyak 10.267 jiwa atau sebesar 3% dari jumlah penduduk wajib Ktp el							Sebesar 78% di tahun 2024

sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Painan, 19 Mei 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Ke Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (ktp El) Tujuan : Meningkatnya Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebesar 78% di tahun 2024	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 3. Jumlah Penduduk Per 31 Desember 2022 sebanyak 520.293 Jiwa 4. Berdasarkan Data DKB Semester 2 Tahun 2022 Jumlah penduduk wajib KTP el sebanyak 374.556 jiwa 5. Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP el sebanyak 364.289 jiwa atau sebesar 97%	Akses: 1. Masih adanya data ganda dan penduduk yang sudah meninggal yang belum diterbitkan akta kematiannya, sehingga datanya masih ada di database kependudukan 2. Tahun 2024 akan dilakukannya Pemilihan Umum secara serentak Partisipasi : Agar Pelayanan Perekaman KTP el dilakukan ke Sekolah-sekolah dan Nagari-nagari Control : Masih ada 3% penduduk yang belum melakukan perekaman KTP el Manfaat : Wajib KTP el berjumlah 374.556 jiwa, yang sudah memiliki KTP 364.289 jiwa	1. Masih kurangnya peralatan perekaman KTP el untuk dibawa ke Sekolah-Sekolah dan Nagari-nagari. 2. Adanya data ganda yang belum diketahui 3. Kurangnya sarana penunjang untuk penduduk disabilitas 4. Seringnya terjadi kekurangan Blangko KTP el	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP el.	Meningkatnya Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang responsive gender	1. Melakukan Pelayanan perekaman KTP el ke Sekolah-sekolah dan Nagari nagari 2. Menyediakan Peralatan perekaman dan Mesin Cetak KTP el dalam melakukan pelayanan langsung ke Sekolah-sekolah dan Nagari-nagari. 3. Menyediakan sarana penunjang disabilitas perekaman KTP el.	1. Berdasarkan Data DKB Semester 2 Tahun 2022 Jumlah penduduk wajib KTP el sebanyak 374.556 jiwa 2. Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP el sebanyak 364.289 jiwa atau sebesar 97% 3. Jumlah Penduduk yang belum memiliki KTP el sebanyak 10.267 jia atau sebesar 3% dari jumlah penduduk wajib Ktp el	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (ktp El) Input : Rp. 207.500.000,- Output: Diterbitkannya KTP el sebanyak 23.000 keping Outcome : Meningkatnya Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja

Painan, 19 Mei 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KIA) Tujuan : Meningkatnya Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Sebesar 78% di tahun 2024	- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. - Jumlah Penduduk Per 31 Desember 2022 sebanyak 520.293 Jiwa - Berdasarkan Data DKB Semester 2 Tahun 2022 Jumlah penduduk wajib KIA sebanyak 145.736 jiwa - Jumah anak yang sudah memiliki sebanyak 104.930 jiwa atau sebesar 70%	Akses: Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Manfaat Kartu Identitas Anak. Partisipasi : Masih kurangnya Informasi tentang Kartu Identitas Anak yang sampai ke Penduduk Control : Masih Rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak Manfaat : Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 104.930 jiwa atau sebesar 70%	- Masih rendahnya capaian persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2022 yaitu sebesar 70 % - Masih kurangnya penyebaran Informasi Kartu Identitas Anak.	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Manfaat Kartu Identitas Anak Responsive Gender.	- Meningkatnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak - Meningkatnya rasip Anak yang memiliki KIA	- Menerbitkan Dokumen KIA dan memberikan kepada anak usia 0-17 tahun - Memberikan Dokumen KIA ke Sekolah-sekolah - Melakukan Sosialisasi Kesekolah terkait penerbitan dokumen KIA	- Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2022 sebesar 70 % - Jumlah Anak Wajib KIA berjumlah 145.736 jiwa terdiri dari laki-laki 575.575 jiwa dan perempuan sebanyak 70.161 jiwa - Jumah anak yang sudah memiliki sebanyak 104.930 jiwa atau sebesar 70% - Jumlah Penduduk yang belum memiliki KIA sebanyak	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KIA) Input : Rp.108.000.000 Output: Diterbitkannya kartu Identitas Anak sebanyak 36.000 keping Outcome : Meningkatnya Kepemilikan kartu Identitas Anak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	6. Jumlah Penduduk yang belum memiliki KIA sebanyak 40.806 jiwa atau sebesar 30%						40.806 jiwa atau sebesar 30%	

sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Painan, 19 Mei 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

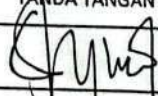
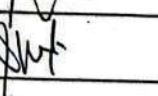
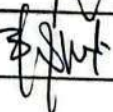
OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tujuan : Meningkatkan Ketersediaan sarana penunjang	- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. - Jumlah Penduduk yang berusia 60 tahun keatas berdasarkan Data Agregat Kependudukan 2022 sebanyak 66.438 jiwa dari total jumlah 520.293 jiwa. - Belum tersedianya loket Pelayanan khusus disabilitas - Belum tersedianya toilet khusus disabilitas	Akses: Masyarakat merasa enggan untuk datang mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. Partisipasi : Masyarakat yang datang merasa kurang nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena ruang dan sarana yang tidak nyaman. Control : Dukumen perencanaan dalam peningkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan Manfaat : Menurunnya IKM Pelayanan Adminduk karena kurangnya fasilitas pelayanan.	Belum tersedianya ruangan pelayanan dan toilet khusus disabilitas	Penduduk disabilitas merasa kurang nyaman melakukan datang untuk mengurus dokumen kependudukan	Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat	1. Melakukan renovasi gedung kantor dengan membuat ruang pelayanan, dan toilet khusus disabilitas,	- Jumlah Penduduk yang berusia 60 tahun keatas berdasarkan Data Agregat Kependudukan 2022 sebanyak 66.438 jiwa dari total jumlah 520.293 jiwa. - Belum tersedianya loket Pelayanan khusus disabilitas - Belum tersedianya toilet khusus disabilitas	kegiatan I : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Input : Rp. 20.000.000 Output : Tersedianya Ruangan pelayanan, dan toilet khusus disabilitas Outcome : Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan khusus disabilitas

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : Dinas Dukcapil.
 HARI/TANGGAL : Rabu/17 Mei 2023
 TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
 VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan atau Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KIA)	- perbaikan sistem dan Autcam - kegiatan pra prosedur sistem penunjang disabilitas
2	Pelayanan Pendaftaran atau Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan dokumen atau hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KTP-EI)	- pada sub kegiatan penerbitan dokumen dokumen EIA. dengan ARI penerbitan dokumen kepada anak umur dengan 17 tahun (EIA), dan sosialisasi ke sekolah, kepala pemerintahan EIA. - Autcam & ERI EIA dan pemanfaatan terhadap EIA. - Solusi ke outcom yg relevan ARI

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Ulumest, SE MSi		KEF KMDRA	
2	Sofaneri			
3	Irma Julia			
4	Agul Hamid			

- masukan sub kegiatan lagi peralatan Gedung Reintor,

Catatan. Perbaikan & kembalikan pada Idemat. - 19/5.2023

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

: Dinas Perhubungan

: 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
ma Kebijakan/ gram/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
GRAM : Pengelolaan Lintas dan Jalan ATAN: Rencana Jaringan LLAJ Kota Kegiatan : Pengendalian Kegiatan Induk Jalan AN: Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat	- Kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas darat merupakan kegiatan penugasan tenaga lapangan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di titik potensi kecelakaan lalu lintas. - Tujuan kegiatan ini adalah untuk meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas terutama pada jam sibuk pagi. - Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini bersinergi dengan anggota Kepolisian. - Pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat juga ditujukan untuk pamanajemen arus lalu	<u>Akses:</u> - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas. - Masih banyaknya ditemui pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi dengan kaca sepijon <u>Kontrol</u> - Masih kurangnya pengawasan terhadap dan penindakan terhadap penerapan laik jalan kendaraan bermotor <u>Manfaat</u> - Masih tingginya potensi kecelakaan lalu lintas jalan raya <u>Partisipasi</u> - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan	- Kurangnya jumlah petugas lapangan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas - Tidak tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan yang memahami konsep manajemen dan rekayasa lalu lintas - Minimnya biaya operasional untuk tenaga lapangan	- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami etika berkendara dan mengemudi - Masih kurangnya kepaahaman masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang diwujudkan dengan perlengkapan jalan berupa marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat keselamatan jalan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat untuk menanggulangi potensi kecelakaan lalu lintas jalan raya	- Melaksanakan koordinasi internal Bidang Lalu Lintas dan angkutan untuk merencanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat. - Melaksanakan konsultasi publik dengan masyarakat terkait penerapan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan cara bersinergi dengan Forum LLAJ. - Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas di titik potensi kecelakaan lalu lintas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat sebanyak 12 laporan kegiatan dalam satu tahun	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Jalan Input : Rp. 150.000. Output : Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat sebanyak 12 laporan Outcome : Prosentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan kabupaten

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ m/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	lintas di saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru dan disaat adanya kunjungan pejabat Negara atau tamu daerah.	manajemen dan rekayasa lalu lintas	manajemen dan rekayasa lalu lintas					

Painan, 14 Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SYAFRIJONI, SH, M.Si

NIP. 19680904 199308 1 001

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

: Dinas Perhubungan

: 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ m/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
AM : Penunjang ahan en/Kota AN: araan Milik Daerah ng Urusan ah Daerah iatan : araan / asi Gedung an n lainnya : aranya Kantor dan n Lainnya	- Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan merupakan kegiatan rutin tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. - Kegiatan ini merupakan upaya perbaikan fasilitas penunjang kantor dinas perhubungan dalam melayani masyarakat, seperti fasilitas toilet, ruang tunggu pelayanan, tempat ibadah.	<u>Akses:</u> - Masih terdapat fasilitas toilet yang rusak dan tidak berfungsi <u>Kontrol</u> - Fasilitas toilet kantor masih belum dipisahkan antara pengguna pria dan wanita <u>Manfaat</u> - Dapat mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat <u>Partisipasi</u> - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap pelayanan dinas	- Kurangnya kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pelayanan dinas - Fasilitas Gedung Kantor belum seluruhnya terpelihara dengan baik	- Kurangnya peran masyarakat dalam memberi saran dan masukan terhadap pelayanan dinas perhubungan - Minimnya anggaran biaya untuk kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas gedung kantor.	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelayanan Dinas Perhubungan kepada Masyarakat.	- Melaksanakan koordinasi internal Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK untuk menentukan kebijakan pemeliharaan fasilitas penunjang Kantor. - Menentukan proiritas fasilitas penunjang pelayanan yang sudah rusak dan tidak berfungsi untuk dilakukan perbaikan utamanya adalah fasilitas toilet yang rusak. - Menghitung perkiraan anggaran biaya untuk perbaikan fasilitas yang sudah rusak. - Mengoptimalkan penggunaan anggaran	Jumlah fasilitas gedung kantor yang dilakukan perbaikan dalam satu tahun minimal 2 unit fasilitas kantor.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Input : Rp. 100.000.000 Output : Terlaksananya upaya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Outcome : Jumlah Unit fasilitas yang dilakukan pemeliharaan minimal 2 unit.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
						pemeliharaan gedung kantor dan bangunan. - Menentukan fasilitas toilet kantor khusus pria dan toilet khusus untuk wanita		

Painan, 16 Mei 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAERIJONI, SH, M.Si
 NIP. 19680904 199308 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD : Dinas Perhubungan
 un : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator K
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KEGIATAN: Penyediaan Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Penyediaan Perengkapan jalan di Kabupaten/kota TUJUAN: Menyediakan Perengkapan jalan di Kabupaten/kota	- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perengkapan jalan merupakan unsur dari Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. - Penyediaan perengkapan jalan meliputi kegiatan survey kebutuhan, pengadaan dan pemasangan perengkapan jalan.	<u>Akses:</u> - Masih kurangnya perengkapan jalan di jalan kabupaten <u>Kontrol</u> - Perengkapan jalan yang belum mempertimbangkan pemberian akses kepada kaum berkebutuhan khusus dan disabilitas <u>Manfaat</u> - Timbulnya resiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan kabupaten. <u>Partisipasi</u> - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis perengkapan jalan di jalan kabupaten.	- Kurangnya SDM Pegawai Dinas Perhubungan di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - Minimnya peralatan survey untuk penentuan kebutuhan perengkapan jalan.	- Tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas masyarakat yang rendah - Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang kurang ramah terhadap kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus	Menyediakan perengkapan jalan untuk menanggulangi resiko kecelakaan lalu lintas dan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas untuk kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus	- Rapat pelaksanaan kegiatan penyediaan perengkapan jalan - Mengakomodir peran serta masyarakat dalam penentuan kebutuhan perengkapan jalan dengan bersinergi dengan Forum LLAJ - Melaksanakan survey kebutuhan perengkapan jalan - Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perengkapan jalan. - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembuatan Dokumen Kontrak Kegiatan - Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bersama Tim PHO	- Jumlah unit kebutuhan perengkapan jalan di jalan kabupaten - Jumlah pemasangan perengkapan jalan di jalan kabupaten	Sub Kegiatan Penyediaan perengkapan jalan kabupaten Input : Rp. 600.000.000 Output : Jumlah Perengkapan jalan yang ter Outcome : Rasio Pemasangan Perengkapan jalan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
a Kebijakan/ ram/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
						- Pembuatan Dokumen dan Berita Acara Pembayaran Penyelesaian Pekerjaan - Pengarsipan Dokumen Kegiatan		

Painan, 16 Mei 2023

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN
**SYAERIJONI, SH, M.Si**

NIP. 19680904 199308 1 001

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

: Dinas Perhubungan

: 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
RAM : m Pelayaran TAN: pan lintas erangan dan rjuan erasian untuk ang melayani erangan daerah ten/kota EGIATAN : ndalian dan wasan n lintas erangan dan rjuan erasian untuk ang melayani erangan daerah ten/kota N: sananya wasan dan	- Kegiatan pengawasan pengendalian dan pengendalian lalu lintas laut merupakan kegiatan wajib dinas perhubungan setiap tahun. - Implementasi kegiatan ini adalah menugaskan petugas pengawas dinas perhubungan untuk mengawasi pelayanan kapal wisata di dermaga tempat wisata di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan - Tugas dari petugas dinas perhubungan yaitu: - Menghitung jumlah penumpang naik dan turun kapal wisata. - Mengawasi sistem pembelian tiket kapal wisata dan memastikan penumpang kapal wisata terlindungi dengan asuransi kecelakaan Jasa	<u>Akses:</u> - Masih terdapat operator kapal wisata yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang kapal sehingga membahayakan keselamatan penumpang. <u>Kontrol</u> - Masih adanya pelaku operator kapal yang belum melengkapi dokumen kapal wisata <u>Manfaat</u> - Masih terdapat pelaku operator kapal wisata yang tidak mau bekerjasama dengan Jasa Raharja dengan memberikan asuransi melalui penjualan karcis <u>Partisipasi</u> - Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku kapal wisata tentang pentingnya	- Tidak tersedianya SDM pegawai Dinas Perhubungan tentang standar keselamatan kapal wisata - Belum mencukupinya anggaran biaya operasional untuk petugas pengendalian dan pengawasan operasional kapal wisata - Masih kurangnya sinergi dengan Kepolisian dan TNI AL untuk mewujudkan keselamatan kapal wisata	- Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kapal wisata namun kesadaran terhadap keselamatan penumpang kapal wisata masih rendah - Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku kapal wisata tentang pentingnya dokumen kapal wisata dan keselamatan penumpang kapal	Terkendalinya operasional dan meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas laut kapal wisata	- Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian, TNI AL dan pelaku kapal wisata untuk pengawasan lalu lintas laut melalui Forum LLAJ. - Melaksanakan rapat kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas kapal wisata.	- Laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas laut. - Jumlah penumpang kapal wisata di dermaga tempat wisata	Sub Kegiatan: pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota Input : Rp. 150.000.000 Output : Terlaksananya pengawasan dan pendalian lalu lintas angkutan laut Outcome : Laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kegiatan/	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
lu lintas ut	Raharja. 3. Membantu penumpang kapal wisata dalam mengenakan alat keselamatan berupa jaket pelampung.	dokumen kapal wisata dan keselamatan penumpang kapal						lalu lintas laut. - Jumlah penumpang kapal wisata di dermaga tempat wisata

Painan, 16 Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

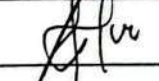
SYAERUONI, SH, M.Si

NIP. 19680904 199308 1 001

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kab/kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kab/kota	- Merupakan lanjutan perencanaan th 2023 yang telah mengakomodir Anggaran ya - pengadaan marka ² lalu lintas, zebra cross yang lebih sistematis untuk menunjang keselamatan
2	Pelayaran	Penetapan Lintas Penyelenggaraan Dalam Daerah Kabupaten / kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyebarangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten.	Ditambahkan untuk uraian GAP dan GBS nya sub kegiatan pemeliharaan gedung Kantor yang memfasilitasi tolak penumpang dan laki
3	Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan	Penetapan Rencana induk Jaringan LAJ kabupaten/kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Jalan.	

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMBA, SH, MM		Musliardi	
2	WIDYANTORO, S.Pi		Galusda Yenti	
3	YEFFIAL, S.H, M.M		Husain Abdul Salam	
4	HILDA ZUSWARNI, SE			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	6. Jumlah pencari kerja tahun 2022 sebanyak 1747 orang, laki-laki sebanyak 847 orang dan perempuan sebanyak 900 orang.					sarana dan prasarana pelatihan	pada tahun 2020 pelatihan pengelasan smaw 3G, pelatihan asisten pembuat pakaian, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan pemeliharaan berkala kendaraan ringan, pelatihan pemasangan listrik bangunan sederhana, pelatihan pembuatan masker. 8. Jumlah tenaga kerja terlatih tahun 2022 sebanyak 128	

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

OPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. - Berdasarkan data keragaan koperasi tahun 2022, jumlah koperasi yang ada di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 326 unit, koperasi aktif sebanyak 154 unit dan sisanya merupakan koperasi tidak aktif sebanyak 172 unit. Jumlah anggota koperasi 17.555	Akses : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam manajemen koperasi. 2. Kepengurusan koperasi didominasi oleh laki-laki Partisipasi : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kontrol : Penilaian kinerja koperasi belum berbasis gender. Manfaat: Pengurus koperasi belum menyadari sepenuhnya manfaat dari kegiatan pembinaan dan	1. Keterbatasan jumlah SDM Bidang koperasi dalam memberikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 2. Masih rendahnya alokasi anggaran, khususnya untuk pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 4. Minimnya anggaran untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 5. Kurangnya informasi dalam pengarusutamaan gender di	1. Masih rendahnya pemahaman Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian. 2. Rendahnya kesadaran anggota dalam berkoperasi 2. Masih kuatnya budaya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. 3. Kurangnya pemahaman terhadap konsep gender.	Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender • Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang memperhatikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di koperasi. • Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi Pengurus Koperasi.	1. Melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi serta memberikan pemahaman kepada anggota koperasi khususnya perempuan untuk pengkaderan menjadi pengurus koperasi. 2. Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender.	- Jumlah koperasi aktif = 154 unit - Jumlah Pengurus Koperasi laki-laki = 80% - Jumlah Pengurus Koperasi perempuan = 20%	Input : 1. Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pengurus Koperasi yang laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah kriteria penilaian kinerja koperasi yang melihat kepada aspek gender mulai dari keanggotaan koperasi, pengurus, manajer dan pengawas. Output - Jumlah pengurus koperasi laki laki dan perempuan yang terlatih - Jumlah koperas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
							orang, laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 80 orang 9. Jumlah pencari kerja tahun 2022 sebanyak 1747 orang, laki-laki sebanyak 847 orang dan perempuan sebanyak 900 orang.	

Painan, 19 Mei 2023

Pt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Jumlah Instruktur pelatihan yang ada 10 (sepuluh) orang, kekurangan instruktur 18 orang. 4. Peralatan pelatihan masih memakai peralatan yang lama. Peralatan pelatihan	Akses : Masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan yang ada. Partisipasi : Masih banyaknya masyarakat laki-laki dan perempuan yang	1. Keterbatasan anggaran pelatihan 2. Kualitas SDM Instruktur terbatas 3. Kurangnya instruktur pelatihan 4. Kondisi peralatan pelatihan yang sudah tidak	1. Jarak tempuh siswa dari domisili ke BLK terlalu jauh 2. Kurangnya akses informasi pelatihan ke calon siswa karena calon siswa ada yang dipelosok-pelosok.	Tersedianya pencari kerja (Calon Tenaga Kerja yang terlatih dan terampil)	1. Koordinasi dengan PEMDA tentang kurangnya instruktur pelatihan yang ASN. 2. Koordinasi dengan Kementerian Tenaga kerja dan PEMDA 5. Mengusulkan penambahan instruktur bagi	1. Jumlah Instruktur 10 (sepuluh) orang, kekurangan instruktur 18 orang. 6. Peralatan pelatihan masih peralatan yang lama. Peralatan pelatihan jurusan pembangunan yang rusak (ketam tangan besi panjang, ketam tangan besi pendek, ketam tangan bes	Input : Rp. 3.376.807.160 Outcome : Terlatihnya tenaga pencari kerja sebanyak 750 orang Output : 1. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pencari kerja

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
berdasarkan Klaster Kompetensi Tujuan : Tersedianya pencari kerja (Calon Tenaga Kerja yang terlatih)	jurusan pembangunan yang rusak (ketam tangan besi panjang, ketam tangan besi pendek, ketam tangan bes menengah, ketam tangan besi pelides, pahat tangan cembung, speed cat wagum, mesin bubut kayu, mesin bor duduk, mesin gesindra biasa, mesin gerinda/ knife gerinden) peralatan pelatihan jurusan otomotif yang rusak (sprak plug gap, torque wrench handle, kotak pekakas,offset wrench, socket wrench, ratchet handle, kunci busi, adjustable wrench12, combination plier, water pump plier, pipe wrech, pound trough screw driver) peralatan pelatihan jurusan bubut dan las kurang baik (mesin bubut,	membutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. Kontrol : 1. Masih kurangnya pemantauan terhadap peserta pelatihan yang sudah diberikan 2. Perlunya penambahan instruktur pelatihan yang ASN. 3. Penambahan peralatan pelatihan.	memadai . 3. Belum adanya asrama untuk peserta pelatihan 5.Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang	3.Kurangnya minat calon siswa untuk mengikuti pelatihan 4.Terbatasnya jumlah peserta pelatihan		instruktur kejuruan yang telah pensiun dan kejuruan yang belum ada instrukturnya 6. Mengusulkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan PEMDA pengadaan peralatan pelatihan baru. 7. Mengusulkan pembangunan a srama siswa. 8. Melaksanakan sosialisasi pelatihan disetiap kecamatan/naga	menengah, ketam tangan besi pelides, pahat tangan cembung, speed cat wagum, mesin bubut kayu, mesin bor duduk, mesin gesindra biasa, mesin gerinda/ knife gerinden) peralatan pelatihan jurusan otomotif ysng rusak (sprak plug gap, torque wrench handle, kotak pekakas,offset wrench, socket wrench, ratchet handle, kunci busi, adjustable wrench12, combination plier,	2.Terpenuhinya perlatan pelatihan di setiap jurusan. 3.Tersedianya asrama siswa yang representatif 4.Terpenuhinya instruktur pelatihan yang menguasai teknologi IT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	mesin bor, mesin skrup, mesin pemotong plat, mesin gergaji, pompa air, mesin las, maximat, mesin fres, mesin ulir pipa, mesin tempa, ragam) 5. Tidak adanya asrama untuk siswa untuk pelatihan. 3. Rata-rata instruktur yang ada belum menguasai teknologi IT. 4. Pelatihan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 8 paket. 5. Jumlah tenaga kerja terlatih tahun 2022 sebanyak 128 orang, laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 80 orang	4. Perlunya pembangunan asrama Siswa pelatihan. 5. Instruktur yang ada harus mengikuti kursus pelatihan IT				ri se Kabupaten Pesisir Selatan 9. Melakukan pelatihan untuk tenaga kerja sebanyak 750 dari 15 kecamatan 10. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan 11. Pengadaan sarana dan prasarana tentang Teknologi IT untuk intruktur 12. Pengadaan	water pump plier, pipe wrech, pound trough screw driver) peralatan pelatihan jurusan bubut dan las kurang baik (mesin bubut, mesin bor, mesin skrup, mesin pemotong plat, mesin gergaji, pompa air, mesin las, maximat, mesin fres, mesin ulir pipa, mesin tempa, ragam) 2. Tidak adanya asrama untuk siswa untuk pelatihan. 7. Pelatihan yang sudah dilakukan	

Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Kinerja
	orang, laki-laki sebanyak 8.343 orang dan perempuan sebanyak 9.212 orang - Dari 154 unit koperasi tersebut, yang menjadi Pengurus Koperasi didominasi oleh laki-laki sekitar $\pm$ 80%, sedangkan perempuan hanya sebesar 20%.	pengawasan koperasi yang sudah dilaksanakan.	lingkungan koperasi,					yang diperiksa dan diawasi Outcome Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang responsive gender Jumlah anggaran : Rp. 33.499.800,-

Painan, 19 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan



LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD

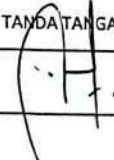
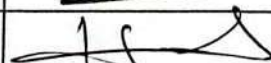
HARI/TANGGAL

TEMPAT

VERIFIKASI

: Dinas koperasi, UMKM dan Tenaga kerja
: Rabu/17 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/kota.	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan kab/kota	Tambah Pelatihan Tenaga kerja, Tambah Pembangunan untuk tempat tinggal bagi Para Pencari kerja. Bahan tidak ada Pasai Stempel dan hasil soft copy nya Tolong diperjelas. Kantor kpn masih digolongkan aktif → 154 Kurangnya Masyarakat untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman.
2	Pelatih kerja dan Produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, S.H, MM		ELFITRI YENI	
2	YEFRIAL, S.H., M.M			
3	HILDA ZUSWARTI, S.E			
4	WIDYANTORO, S.PI			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Hasil Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tujuan : ➢ Terlaksananya 100% Rehabilitasi Gedung Kantor untuk penambahan Ruang Laktasi, Ruang Mushollah dan Ruang Pelayanan yang menyediakan fasilitas untuk ruang bermain anak yang memadai dan representative.	- Gedung kantor Disarpora belum mencerminkan Gedung kantor yang representative sebagai tempat kerja yang nyaman dan modern. - Belum semua ruangan pada Disarpora tersedia dan dapat memenuhi hak seluruh pegawai sebagai Aparatur Negeri Sipil, khususnya Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak dan Mushollah. - Jumlah pegawai perempuan pada Disarpora yang mencapai 31,43 % mengharuskan tersedianya Ruang Laktasi, Mushollah dan Ruang Bermain Anak yang representative dan responsive gender. - Dengan terciptanya ruangan Gedung kantor yang representative dan responsive gender tentu juga akan parallel dengan meningkatnya kinerja seluruh pegawai yang nantinya akan berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).	1). Akses - Sarana dan prasarana di Disarpora masih minim. - Belum tersedianya ruangan gedung kantor yang memadai, khususnya Ruang Laktasi, Mushollah yang representative dan responsive gender serta ruang bermain anak. - Rehabilitasi kantor diharapkan akan mengakomodir kebutuhan untuk penambahan ruang laktasi, mushollah dan ruang bermain anak. 2). Partisipasi - Belum seluruh pegawai yang ada di Disarpora paham akan pentingnya pengarusutamaan gender. 3). Kontrol : - Ruangan kantor yang ada hanya sekedar memenuhi tempat bekerja saja, belum memenuhi hak pegawai. 4). Manfaat : - Gedung kantor Disarpora belum mencerminkan ruangan yang nyaman bagi seluruh	- Pengelola kegiatan belum responsive gender - Pandangan yang salah dari sebagian pegawai Disarpora dalam memahami isu gender.	Karena keterbatasan anggaran yang diberikan TAPD pada Disarpora yang mengakibatkan sarana dan prasarana masih minim.	Terwujudnya Gedung kantor yang nyaman represntatif, khususnya ruang laktasi, mushollah dan ruang bermain anak yang responsive gender.	- Sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pentingnya pengarusutamaan gender. - Implementasi rehab Gedung kantor yaitu penambahan ruang laktasi, mushollah dan ruang tempat bermain anak.	- Fasilitas umum yang ada pada kantor Disarpora adalah tempat parkir, belum tersedia ruang laktasi, mushollah dan ruang tempat bermain anak. - Ruang kerja yang ada masih terbatas belum mengakomodasi kebutuhan pegawai. - Komposisi jenis kelamin pada Disarpora adalah 68,57% laki-laki dan 31,43 % perempuan.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Input : Rp. 80.350.000,- Output : Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi adalah 1 Unit. Outcome : Ruangan laktasi representative, mushollah dan ruang bermain anak yang resposif gender.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	oleh tim penilai Tk. Kabupaten serta memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan bidang kepeloporannya - Penilaian juga melibatkan pemuda pelopor yang pernah mendapat juara pada tahun sebelumnya, selain untuk memotivasi juga untuk berbagi pengalaman - Pemuda/i yang terpilih akan diutus untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat							

Painan, 19 Mei 2023
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan,



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP : 19670723 199512 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Hasil Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri DayaTarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Tujuan : Mencari talenta muda generasi Pesisir Selatan yang memiliki karakteristik, kepribadian yang bagus serta pengetahuan yang luas, kedepannya para talenta yang terpilih sebagai uda-uni Pesisir Selatan ini pada periodenya, akan memiliki suatu tanggung jawab untuk mengenalkan Pesisir Selatan ke dunia luar, dari segi konteks budaya, kesenian dan lain-lain.	- Pemilihan Uda uni Kab Pesisir Selatan Merupakan suatu ajang pencarian bakat yang di peruntukkan untuk pemuda pemudi Kab. Pesisir Selatan dalam berkontribusi untuk mempromosikan pariwisata Kab. Pesisir Selatan. - Dalam Pemilihan Uda Uni Kab. Pesisir Selatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Kab. Pesisir Selatan - Audisi peserta Uda Uni tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan seluruh alumni dari Uda Uni tersebut. - Peserta audisi diikuti oleh putra putri asli Pesisir Selatan dengan penyeleksian sebanyak 32 pasang yang nanti pada penyeleksian akhir di ambil 15 pasang yang memiliki Pengetahuan, Penampilan, dan Inner beuty. - Peserta yang telah dipilih tersebut diberikan pembekalan selama 3 hari yang nanti dapat digunakan untuk melihat bakat yang dimiliki oleh setiap peserta. - Malam puncak Pemilihan Uda Uni Kab. Pesisir Selatan dilaksanakan untuk memilih siapa Uda Uni Kab.	1). Akses • Kurangnya jumlah siswa – siswi yang memenuhi standar dan kriteria yang telah ditentukan. • Kurangnya SDM siswa dan keahlian dalam ajang pencarian bakat 2). Partisipasi • Belum banyak peminat untuk ikut serta dalam penilaian karena sosialisasi yang masih kurang 3). Kontrol : • Masih kurangnya referensi pemuda/i dalam hal ajang mencari bakat di Kabupaten Pesisir Selatan 4). Manfaat : • Rasa ingin bersaing masih kurang • Penerapan ilmu yang dimiliki oleh peserta belum maksimal karena fasilitas komunikasi masih lemah	• Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait • Tidak sampainya Sosialisasi Pemilihan uda uni tingkat Kabupaten Pesisir Selatan • Kurangnya pengetahuan tentang standar seleksi Pemilihan uda uni tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	• Adanya kemauan tinggi dari siswa-siswi tetapi terkendala dengan persyaratan.	• Memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam mengembangkan bakat dan potensi yang di miliki.	- Membuka peluang generasi muda untuk mengikuti ajang Pemilihan Uda Uni Kabupaten Pesisir Selatan. - Sosialisasi terhadap penggiat pariwisata untuk kegiatan pemasaran/ promosi pariwisata	- Seleksi Peserta diumumkan melalui media massa. - Peserta diikuti oleh seluruh perwakilan kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan. - Jumlah peserta yang mengikuti adalah sebanyak 30 orang dari perwakilan 15 kecamatan.	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Input : Rp.900.000.000,- Output : Terselenggaranya Pemilihan Uda Uni tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Outcome : Meningkatnya Promosi Pariwisata

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Hasil Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tujuan : Meningkatnya Prestasi Pemuda	- Dasar Pelaksanaan yaitu PP No. 41 Tahun 2011 ttg pengembangan kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. - Penilaian dan Pemilihan Pemuda Pelopor Kab Pesisir Selatan merupakan penilaian kepada pemuda/pemudi Kab. Pesisir Selatan yang memiliki kualitas Sumber Daya Pemuda dibidang : - Pendidikan, - Agama, Sosial dan Budaya - Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata - Pangan - Teknologi Tepat Guna. - Pemuda/i yang dinilai usia 16 s.d 30 tahun yang dibuktikan dengan KTP dan Akte Kelahiran, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela, merugikan masy/lingkungan yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari kepolisian - Tujuan kegiatan ini untuk menggelorakan semangat kepeloporan dikalangan pemuda, menemukan pemuda yang memiliki potensi kepeloporan yang nantinya bisa bersaing di tingkat Provinsi maupun Nasional nantinya, serta memberikan penghargaan kepada pemuda yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai pemuda pelopor Tk. Kabupaten Pesisir Selatan - Pemuda/i yang ikut serta dalam penilaian akan langsung dinilai dan ditinjau ke lokasi	- Akses : - Minimnya sosialisasi sehingga menyebabkan sedikitnya peserta - Kurangnya peserta (Pemuda/i) yang usianya masih dibawah 30 tahun dan memiliki potensi kepeloporan pada bidang-bidang yang telah ditetapkan - Partisipasi - Belum banyak peminat untuk ikut serta dalam penilaian karena sosialisasi yang masih kurang - Tidak semua pemuda-pemudi yang memiliki jiwa kepeloporan - Kontrol : - Masih kurangnya referensi pemuda/i dalam hal kepeloporan di Kabupaten Pesisir Selatan - Manfaat : - Rasa ingin bersaing masih kurang - Penerapan ilmu yang dimiliki oleh peserta belum maksimal karena fasilitas komunikasi masih lemah	- Belum semua Pemuda-pemudi yang memiliki jiwa kepeloporan - Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait	- Kurangnya minat dan bakat pemuda pemudi untuk mengikuti penilaian pemuda pelopor - Kurangnya bantuan dari pemerintah kepada pemuda/i yang memiliki potensi kepeloporan	Memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam mengembangkan bakat kepeloporan yang di miliki.	- Mengadakan Penilaian Pemuda Pelopor di Kabupaten Pesisir Selatan - Mengadakan Pelatihan terhadap Pemuda Pelopor di Kabupaten Pesisir Selatan	- Peserta Penilaian Pemuda Pelopor diikuti oleh Pemuda Pemudi Kabupaten Pesisir Selatan dengan melampirkan KTP dan Akte kelahiran. - Peserta Diikuti Oleh Seluruh perwakilan Kecamatan dan Umum - Jumlah Peserta yang mengikuti Penilaian Pemuda Pelopor di Kabupaten Pesisir Selatan tidak dibatasi asalkan memenuhi persyaratan dan kriteria yang ada	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Input : Rp. 50.000.000,- Output : Terlaksananya Penilaian Pemuda Pelopor di Kabupaten Pesisir Selatan. Outcome : Terpilihnya pemuda pelopor

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		pegawai khususnya ruang laktasi, mushollah dan ruang bermain anak.						

Painan, 10 Mei 2023
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kepala Dinas,



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001



Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Pessel yang akan mengikuti ajang Pemilihan Uda Uni Provinsi Sumatera Barat, sekaligus menjadi duta Pariwisata Kab. Pesisir Selatan.							

Painan, 19 Mei 2023
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kepala Dinas,


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP : 19670723 199512 1 001



LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : Dinas Pariwisata
HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pengembangan Pariwisata Dalam & Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis, Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Pariwisata Dalam & Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis, Pariwisata Kabupaten / Kota	Fasilitas Kegiatan Pemusatan Pariwisata Bnke dalam negeri luar negeri pariwisata kab/kota.	Perbaikan Narasi Pd. Rencana Aksi GAB / GBS - Rencana Aksi Sinkronkan kan / myan Gug dgn outcome mra - Rencana Aksi Promosi tiff Konten? Promosi Bong menyusui Pong. Ramah Anak. - Sosialisasi Pd Puggiat Pariwisata * Memeriksa Pong utk Pemusa / Pelajar utk Ikut Seleksi Pong utk Uda & Uti Sebagi Puggiat: Pariwisata muntik - Pelatihan terhadap Pemusa Pelopor Kab. Pissel utk GAB / GBS Pd. 3 kegiatan
2	Pengembangan Pemerintah Daerah	Pemerintahan Gedung Pemerintah Asah.	Pemerintahan atau Rehabilitasi Sman dan Prasarana gedung Kantor & Pongm la	
3	Pengembangan Kapasitas Daya Sangg kepemudaan	Pemuda Pelopor Pemilihan uda uni kabupaten / kota	fasilitas kegiatan Pemusatan Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata kab/kota	

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Yuvasti SS. MSi			
2	Srofianeri SH.			
3	Abdul Anind SH			
4	Imma Zulic			

Perbaikan di Jerim
Pd dari Selasa 17/5/2023

		Manfaat : - Tersedianya data dan informasi yang valid, sehingga bisa digunakan sebagai acuan dan kegiatan lebih tepat sasaran.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.

C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 17 Mei 2023



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Program : 2.14.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 2. Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan : 2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan : 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tujuan : Melakukan pembentukan karakter bangsa terutama dikalangan generasi muda dan remaja.	Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa yang akan datang. Karena itu diperlukan perhatian khusus bagi remaja untuk melakukan pembentukan karakter terutama memberikan pemahaman untuk merencanakan masa depannya baik disesi pendidikan untuk kariernya dimasa yang akan datang	Akses : - Kurangnya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat. Partisipasi : - Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat. Kontrol : - Masih kurang diterapkannya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Manfaat : - Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum mampu memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang Program	Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih bias terhadap Gender.	- Stigma masyarakat bahwa permasalahan yang sering terjadi pada remaja tidak begitu direspon. - Kurangnya pembentukan karakter bangsa terutama dikalangan generasi muda dan remaja. - Kurangnya menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja tentang usia perkawinan.	Tujuan : Melakukan pembentukan karakter bangsa terutama dikalangan generasi muda dan remaja. Dalam rangka merespon permasalahan yang sering terjadi pada remaja, juga untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.	Pengadaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).	Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa yang akan datang. Karena itu diperlukan perhatian khusus bagi remaja untuk melakukan pembentukan karakter terutama memberikan pemahaman untuk merencanakan masa depannya baik disesi pendidikan untuk kariernya dimasa yang akan datang maupun memberikan pemahaman tentang pedewasaan usia perkawinan. Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan	Input : Rencana Aksi II Rp. 80.000.000,- Output : - Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal. Outcome : - 1 Dokumen.

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 17 Mei 2023



Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Program : 2.14.02 Pengendalian Penduduk
Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1. Pengendalian Penduduk Kegiatan : 1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terdapat 525 Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kab. Pesisir Selatan yang kondisinya saat ini hanya menjadi data bias. Artinya secara administrasi datanya ada, tetapi banyak yang tidak aktif lagi, sehingga keberadaannya perlu ditelusuri kembali dan dilakukan pembinaan.	Akses : - Keterbatasan data dukung dan informasi keluarga yang benar dan lengkap sehingga dapat mempengaruhi pencapaian target dan tepatnya sasaran kegiatan. Partisipasi : - Masih rendahnya kesadaran Anggota Keluarga untuk dapat berperan aktif memberikan data yang benar dan informasi yang lengkap.	- Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif agar dapat tersedia data yang benar dan informasi yang lengkap.	- Untuk dapat melindungi kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran dilingkungan keluarga masing-masing terlebih dahulu harus mempunyai data keluarga dan informasi yang lengkap dan benar untuk dijadikan pedoman kegiatan.	- Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga dengan meningkatnya partisipasi dan keaktifan keluarga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga data dan informasi yang tersedia lebih valid. - Dengan kata lain memberikan pemahaman kepada keluarga terkait hak dan kebutuhan khususnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas keluarga tersebut.	- Melakukan Pendataan Keluarga (PK). Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah keluarga yang menjadi sasaran kegiatan.	- Terdapat 525 Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL = 120, BKR = 97, BKB = 188, PIK-R = 57, UPPKA = 63.	Input : Rencana Aksi I Rp. 109.200.000,- Output : - Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya. Outcome : - 1 Dokumen
Tujuan : Tersedianya data dan informasi keluarga agar dapat menginventarisir kebutuhan sasaran masing-masing kegiatan		Kontrol : - Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memfasilitasi pendataan informasi keluarga.						

Dalam rangka merespon permasalahan yang sering terjadi pada remaja, juga untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.	maupun memberikan pemahaman tentang pedewasaan usia perkawinan. Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa. Jumlah : BKR = 97, PIK-R = 57.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB).					Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa. Jumlah : BKR = 97, PIK-R = 57.	
---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 17 Mei 2023



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Program	:	2.14.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan	:	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	:	2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

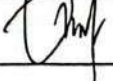
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengendalian angka kelahiran adalah salah satu aspek utama dalam Program KB. Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan (Poktan) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Akses : - Banyaknya Kelompok Kegiatan yang Tidak Aktif, akibat kurangnya pembinaan dan SDM kader dilapangan - Masih kurangnya tentang keberadaan Kelompok Kegiatan di Nagari.	- Kurangnya Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Nagari	- Untuk dapat melindungi kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran dilingkungan keluarga masing-masing terlebih dahulu harus mempunyai data keluarga dan informasi yang lengkap dan benar untuk dijadikan pedoman kegiatan.	- Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dengan meningkatkannya partisipasi dan keaktifan keluarga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga data dan informasi yang tersedia lebih valid. - Dengan kata lain memberikan pemahaman kepada keluarga terkait hak dan kebutuhan khususnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas keluarga tersebut.	- Melakukan Pendataan Keluarga (PK). Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah keluarga yang menjadi sasaran kegiatan.	- Terdapat 525 Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL = 120, BKR = 97, BKB = 188, PIK-R = 57, UPPKA = 63. - Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Input : Rencana Aksi III Rp. 2.194.160.000,- Output : - Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Outcome : - 322 Orang.

Tujuan : Tersedianya Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Partisipasi : - Kurangnya peran aktif kader pada Kelompok Kegiatan di Nagari Kontrol : - Keterbatasan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri oleh kader Manfaat : - Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga dengan meningkatnya partisipasi dan keaktifan keluarga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga data dan informasi yang tersedia lebih valid. - Dengan kata lain memberikan pemahaman kepada keluarga terkait hak dan kebutuhan khususnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas keluarga tersebut.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : DINAS PMD, RP DAN KB
HARI/TANGGAL : Selasa/16 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan	Pencatatan dan Pengum	Tambah Langkah g. tambahkan input
		Pengendalian Penduduk	Rutan data keluarga	
		cakupan Daerah kdb/kota		
2	Pembinaan keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi,	komunikasi, informasi	
		komunikasi, informasi dan	dan Edukasi (KIE)	
		Edukasi (KIE) Pengendalian	program KBPK sesuai	
		Penduduk dan KB sesuai	kearifan Budaya lokal	
		kearifan Budaya lokal		
3	Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan		
		keluarga melalui Pembina-		
		an Ketahanan dan		
		kerejahteraan keluarga		

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, SH, MM		DEVI NURITA	
2	TEPRIAL, SH, MM		MALYUDI ANDRIANSAH PURA	
3	HILDA ZUSWARNI, SE			
4	WIDYANTORO, S.PI			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
sarana dan prasarana gedung kantor serta bangunan lainnya di Kantor Camat Kecamatan Airpura	down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - Kondisi saat ini pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan 2024 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin	Daerah minim - E planning belum mengakomodir semua komponen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kontrol - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan Manfaat Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak	tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar renstra tidak di perbolehkan	kebijakan/ kepala OPD/SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			- komposisi elemen yang hadir pemerintah.. .., swasta...., masyarakat.. . (ormas...., lsm...) - komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) pemuda (18 – 30 th) dewasa (30 – 60 th) lansia (60 th ke atas) - tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan tahun	Urusan Pemerintahan Daerah Outcome; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dst.....

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Permen PPN ini berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - kondisi saat ini pada peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. kontrol - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan manfaat - porsif pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik.	kegiatan yang baru diluar renstra tidak diperbolehkan	- masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - pkk belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal			umur anak-anak (0-18 tahun) pemuda (18 – 30 th) dewasa (30 – 60 th) lansia (60 th ke atas) - tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan tahun 2023 dan 2024	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	lsm1.)							
HASIL VERIFIKASI TIM PENGGERAK PPRG								
PERBAIKAN GAP SETELAH VERIFIKASI								



Tamuan, 22 Mei 2023
CAMAT AIRPURA,

SURMA YENTI, S.Sos

NIP. 196510231989032001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Kecamatan Airpura Tahun 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan : 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan : 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tujuan : Terpeliharanya	-Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Airpura yakni UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, dan Lambang Negara, dan PP 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol tentang Tata Tempat Upacara dan Tata Penghormatan, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen menggunakan pendekatan top	Akses - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum menjangkau semua komponen masyarakat dikarenakan pengurangan anggaran - Jadwal kegiatan Upacara PHBN harus disesuaikan dengan jadwal Daerah dan Pusat - Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan	- Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaa n kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasaan - Tingkat kehadiran pemangku	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	- Tersedianya anggaran bahan dan material serta peralatan bangunan - Terpenuhinya bahan dan material serta peralatan bangunan lapangan yang dibutuhkan - Terpeliharanya sarana da prasarana gedung dan bangunan lainnya se-kecamatan airpura	- Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di wilayah kecamatan tahun 2023 dan 2024 - Terlaksananya Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Kegiatan 1; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kantor Camat Kecamatan Input ; Rp. 33.644.455,- Output; Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	(janda), dll masih minim - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dan 2024	pendekatan top down dan politik		Pemerintah an Daerah belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh pengganggu ran yang maksimal			2024	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan : 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub. Kegiatan :2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Tujuan : Terlaksananya pembinaan TP.PKK Nagari Kecamatan Airpura	- dasar pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yakni dasar pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yakni dasar permendagri no 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden no 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan	- akses - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menjangkau semua komponen pemberdayaan masyarakat dikarenakan pengurangan anggaran - jadwal kegiatan pkk harus disesuaikan dengan jadwal pkk daerah - informasi pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat minim - e-planning belum mengakomodir semua komponen	- pengelola kegiatan belum responsif gender - minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - mindset perencana di bappeda bahwa mengusulkan	- tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala opd/skpd - minim makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan	- terlaksananya pembinaan tp.pkk nagari kecamatan airpura - terlaksananya gerakan masyarakat sehat (germas)	- tersedianya anggaran perjalanan dinas dan makan minum - terpenuhinya perjalanan dinas dan makan minum rapat yang dibutuhkan - terlaksananya pembinaan tp.pkk nagari kecamatan airpura - terlaksananya gerakan masyarakat sehat (germas)	- pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan tahun 2023 dan 2024 peserta yang hadir ... orang. - komposisi jenis kelamin laki-laki dan ... perempuan. - komposisi elemen yang hadir pemerintah.. .., swasta...., masyarakat.. . (ormas..., lsm...) - komposisi peserta dari kelompok	Kegiatan 3; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Input ; Rp.19.000.000,- Output; Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina Outcome; Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina Dst.....

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	perempuan (janda), dll masih minim - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dan 2024	ditentukan oleh pendekatan top down dan politik		Urusan Pemerintahan Daerah belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh pengganggaran yang maksimal			2023 dan 2024	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Kecamatan Airpura	up, teknokratik, politis, aspiratif. - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - Kondisi saat ini pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan 2024 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan	- E planning belum mengakomodir semua komponen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kontrol - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan Manfaat Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh	sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar renstra tidak di perbolehkan	kepala OPD/SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			elemen yang hadir pemerintah.. .., swasta...., masyarakat.. . (ormas...., lsm...) - komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) pemuda (18 – 30 th) dewasa (30 – 60 th) lansia (60 th ke atas) - tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan tahun 2023 dan	Pemerintahan Daerah Outcome; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dst.....

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	tahun 2023 dan 2024 porsinya terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim - pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2023 dan 2024 peserta yang hadir 50 orang. - komposisi jenis kelamin 1 laki-laki dan 50 perempuan. - komposisi elemen yang hadir pemerintah 10 swasta 2 masyarakat 3 (ormas.1.,							

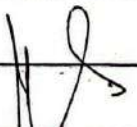
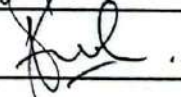
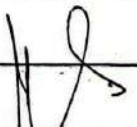
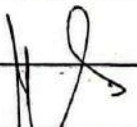
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan : 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan :2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tujuan : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di Kantor Camat	-Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan yakni UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, dan Lambang Negara, dan PP 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol tentang Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen menggunakan pendekatan top down, bottom	Akses - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum menjangkau semua komponen masyarakat dikarenakan pengurangan anggaran - Jadwal kegiatan Upacara PHBN harus disesuaikan dengan jadwal Daerah dan Pusat - Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah minim	- Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak	- Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaa n kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasaan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/	- Terlaksana nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	- Tersedianya anggaran bahan dan material serta peralatan bangunan - Terpenuhinya bahan dan material serta peralatan bangunan lapangan yang dibutuhkan - Terpeliharanya sarana da prasarana gedung dan bangunan lainnya se-kecamatan airpura	- Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah di wilayah kecamatan tahun 2023 dan 2024 - Terlaksanan ya Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah di Kecamatan - peserta yang hadir ... orang. - komposisi jenis kelamin laki-laki dan ... perempuan. - komposisi	Kegiatan 2; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di WilayahKecamat an Input ; Rp. 4.500.000,- Output; Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : *Kec. Air Pura*
 HARI/TANGGAL : *Rabu/17 Mei 2023*
 TEMPAT : *Ruang Rapat Bapedalitbang*

VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	<i>Pemeliharaan Gedung & Kantor</i>	<i>Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan</i>	<i>1/ Menyusun Rencana Aksi dgn outcome/output yang measurable</i>
2	<i>Pemeliharaan Pralaks Kantor</i>	<i>Barang milik Daerah</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya.</i>	<i>2/ Rencana Aksi & dilaksanakan dgn outcome & outputnya</i>
3	<i>Kelompok PKK</i>	<i>Penunjang urusan Pemerintahan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>3/ Perbaiki atre GAB & GBS utg 3 Program kegiatan : 1/ Pralaks gedung kantor 2/ Pemeliharaan Gedung kantor 3/ Kelompok PKK. utg Rencana Aksi Narasany- measurable outcome/output Catatan : Bahan? GAB/GBS</i>

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	<i>Yulianti & Ma</i>		<i>Kirpura</i>	
2	<i>Sofianori. & H</i>		<i>Pandi Juli SSTP</i>	
3	<i>Abdul Hawid. SP</i>			
4	<i>Irma Julia</i>		<i>Mayasari Wxy</i>	

*Perbaikannya & terima
 Senin 12/5-2023*

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

TAHUN : 2024

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KEGIATAN : Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di	a. Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan setiap tahunnya. b. Jumlah Penduduk Kecamatan Bayang laki laki dan Perempuan c. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan	1. Isu Dan Faktor Kesenjangan Gender 1.Faktor Kesenjangan a. Akses - banyaknya kegiatan2 yang bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. b. Partisipasi - Rendahnya rasa kepedulian sosial masyarakat.	- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di nagari - Data kurang lengkap - Sarana dan prasarana yang kurang mendukung	1. Kurangnya keinginan/ minat masyarakat untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan 2. Kurangnya informasi tentang pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan 3. Adanya kesibukan atau kegiatan	- Terumuskannya usulan program dan kegiatan untuk rancangan RKPDP - Mengurangi Terjadinya Permasalahan	1. Mengumpulkan dan merekap data dari masing-masing nagari sesuai dengan bidangnya 2. Mengundang keterwakilan seluruh unsur/ kelompok masyarakat 3. Menjalin koordinasi dengan	Data-data dari masyarakat/nagari, kantor instansi,Dinas badan terkait dan Sekolah-sekolah se Kecamatan Bayang	1. Input Anggaran - Rp.9.600.000,- 2. Output - Terumuskannya Rancangan RKPDP Tahun 2024 3. Outcome: - Tertampungnya usulan yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan penguatan data informasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Desa Tujuan : Memperoleh usulan pembangunan dari seluruh nagari	d. Usulan Kegiatan Prioritas Yang Akan Dibiayai Oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Dan APBD Provinsi. e. Program dan Kegiatan yang diprioritaskan pada hasil Musrenbang ditingkat kecamatan banyak yang tidak dimasukkan dalam prioritas Kabupaten	- Masih kurangnya melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan c. Kontrol - Lemahnya tingkat pembinaan		lain dari peserta musyawarah 4. Kurangnya dana pendukung		pihak terkait untuk kelancaran musyawarah 4. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.		

Asam Kumbang, 22 Mei 2023
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 IV NAGARI
 BAYANG UTARA
 REFLIZAL S.P.T.SD
 NIP. 19670710 199210 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

TAHUN : 2024

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpakan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan berupa pelayanan kepada masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan yaitu : - Merekomendasikan surat dispensasi nikah - Merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga - Merekomendasikan	1. Isu Dan Faktor Kesenjangan Gender 1. Faktor Kesenjangan a. Akses • banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya administrasi yang tepat.	- Kurangnya pemahaman dari aparaturnya kecamatan/ petugas pelayanan. - Kurangnya anggaran untuk pos pelayanan. - Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelayanan.	- Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait pentingnya administrasi yang lengkap kepada masyarakat. - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya surat rekomendasi	- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi yang lengkap - Advokasi dan pelatihan gender - Pendataan Penduduk	Paten yang dilaksanakan : - Laki-laki - Perempuan	- Input Anggaran Rp. 4.200.000,- - Output : Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan - Outcome: penguatan data dan Tingkat kepuasan masyarakat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan Tujuan : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	surat keterangan berkelakuan baik - Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Wali Nagari - Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian pejabat wali nagari - Merekomendasikan Pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Bamus Nagari dan Perangkat Pemerintahan Nagari.	b. Partisipasi • Kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap pengurusan administrasi yang baik. c. Kontrol • Belum maksimalnya SOP pada pengurusan administrasi. d. Manfaat Memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
		administrasi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara						

Asam Kurobang, 22 Mei 2023

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

REFLIZAL, S.Pd.SD

NIP. 19670710 199210 1 001

OPD
HARI/TANGGAL
TEMPAT
VERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

: KEC. BOYANG UTARA
: Selasa/16 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

[illegible]

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, SH. MM		YURMANELI	
2	Widyantoro		ISNAWATI	
3				
4	HILDA ZUSWARNI, S-E			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2024

OPD : Camat Sutera
Program :Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan :Pemebrdayaan Lembega kemasyarakatan tingkat kecamatan Sub.kegiatan: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tujuan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	– Jumlah PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari Se Kecamatan Sutera (12 Nagari)	Akses : - Kurangnya Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Kreatif Partisipasi : - Kurangnya Ketersediaan kegiatan Pelatihan Control : - Rendahnya Ketersediaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Manfaat : - Meningkatkan Efektifitas dan Kreatifitas PKK Dengan melakukan kegiatan-Kegiatan PKK	Kurangnya minat masyarakat terhadap ekonomi kreatif	Kurangnya Ketersediaan Kegiatan Pemberdayaan PKK	Menumbuhkan Kembali Kreatifitas PKK dengan melakukan kegiatan- kegiatan PKK	Realisasi Anggaran PKK Selama 12 Bulan	- Kegiatan Jambore PKK sekali Setahun - Kegiatan Pembinaan PKK rutin 12 bulan	Terlaksananya kegiatan jamboree Terlaksananya kegiatan rutin PKK 12 bulan

Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kegiatan :Administrasi Umum. Sub.kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tujuan : Tersedianya Peralatan Mebeleur Gedung Kantor Camat Sutera	- Mebeleur pada Kantor Camat Sutera Pengadaan terakhir pada tahun 2022 terjadi rusak berat - Jumlah Meja yang Rusak sebanyak 5 unit dan Tidak Layak Dipakai	Akses : - Meja yang dipakai sangat tidak layak untuk digunakan - Kursi yang digunakan tidak layak	-Belum tersedianya Anggaran untuk dilakukan Pengadaan Meja dan Kursi Kantor Camat Sutera	-Butuhnya Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang layak	Meningkatkan Kinerja Aparatur Kantor Camat Sutera	- Pengadaan Peralatan Mebeleur Kantor - Pemeliharaan terhadap Mebeleur kantor - Pembelian terhadap sarana dan prasarana Mebeleur kantor camat Sutera	- Jumlah ASN kantor Camat Sutera sebanyak 14 orang - Kondisi Mebeleur jika ditambah kan dengan Staf Honorer sebanyak 9 orang maka Mebeleur yang rusak dengan jumlah tidak terpenuhi	Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana Input :Anggaran yang dibutuhkan Rp. 30.000.000. Ouput: Tersedianya Mebeleur Kantor Outcome ; Tersedianya Mebeleur yang memadai.

Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :Administrasi Umum. Sub.kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Tujuan : Adanya Gedung Kantor Camat Sutera yang representatif	- Gedung Kantor camat Sutera yang dibangun tersebut pada tahun 2002 - Gedung tersebut terjadi kebocoran dibeberapa titik	Akses : - Terjadinya kurang maksimal pelayanan masyarakat Partisipasi : - Dukungan dari Pemerintah daerah Control : - Disampaikan pada dinas terkait Manfaat : - Terselenggaranya pelayanan secara maksimal	-Harus ada perbaikan dan anggaran perbaikan gedung tersebut	-terganggunya pelayanan masyarakat	Tercapainya pelayanan terhadap masyarakat dengan gedung representatif	- Dilakukan Rehab sedang secara menyeluruh - Untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal	- Terciptanya pelayanan masyarakat kecamatan Sutera lebih maksimal	Kegiatan : rehap gedung Kantor Camat Sutera Input :Anggaran yang dibutuhkan Rp. 15.000.000. Ouput: pengadaan perbaikan Kantor Camat Sutera Outcome ; Terpenuhinya Fasilitas Kantor yang nyaman dan Representatif

Surantih, Mei 2023

CAMAT SUTERA

SALMAN ALFARISI BRUTU,S.STP.M.Si
NIP.19780215 199802 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Kecamatan Batang Kapas

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEGIATAN - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah penduduk Kec. Batang Kapas, L = 18.679 P = 18.670 Jml = 37.349	Akses: - Keterbatasan fasilitas dan akses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Partisipasi: - Kebutuhan masyarakat terhadap tertib administrasi yang hanya berdasar kebutuhan yang mendesak Control: - Kurangnya informasi terhadap data yang valid Manfaat : - Memudahkan masyarakat yang akan dilayani	- Anggaran terbatas	- Kurangnya fasilitas dan akses yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	- Menyediakan fasilitas dan akses yang memudahkan masyarakat dalam berurusan	- Data Masyarakat yang melakukan pelayanan ke Kecamatan	- Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 65.000.000 - Tersedianya tenaga pelayanan umum yang akan memudahkan masyarakat yang akan dilayani - Terlaksananya kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah penduduk Kec.Batang Kapas, L= 18.679 P= 18.670 Jml = 37.349	Akses: - Keterbatasan fasilitas dan akses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Partisipasi: - Kebutuhan masyarakat terhadap tertib administrasi yang hanya berdasar kebutuhan yang mendesak Control: - Kurangnya informasi terhadap data yang valid Manfaat : - Memudahkan masyarakat yang akan dilayani	- Anggaran terbatas	- Kurangnya fasilitas dan akses yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, ibu menyusui, dan ruang bermain untuk anak	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	- Menyediakan akses untuk penyandang disabilitas - Menyediakan Ruang Ibu Menyusui - Menyediakan ruang bermain untuk anak	- Data Masyarakat yang melakukan pelayanan ke Kecamatan	- Input : dana yang dibutuhkan Rp.20.000.000 - Tersedianya akses bagi penyandang disabilitas, ruangan menyusui dan ruang bermain untuk anak - Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan baik

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Akses: - Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan musrenbang	- Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah peserta musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan dari calon peserta musrenbang	- Kurangnya ketersediaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. - Kurangnya informasi tentang kegiatan musrenbang - Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri musrenbang	Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	- Melaksanakan musrenbang tingkat nagari - Melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan	- Kegiatan pra musrenbang di tingkat nagari dan tingkat kecamatan - Kegiatan musrenbang nagari dan musrenbang kecamatan	- Input : dana yang dibutuhkan Rp.20.000.000 - Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat nagari - Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan
KEGIATAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Musrenbang kecamatan	Partisipasi: - Kurangnya ketersediaan fasilitas untuk pelaksanaan musrenbang						
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Nagari se-kecamatan Batang Kapas	Control: - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Manfaat : - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa						

Limau Sundai, 22 Mei 2023

Camat Batang Kapas



DENNY ANGGA, SSTP., M.Ec.Dev

NIP.198701012006021001

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2024**

OPD : KECAMATAN IV JURAI

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Langkap 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkap 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tujuan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari se Kecamatan IV Jurai (20 Nagari)	Akses : - Kurangnya Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Kreatif Partisipasi : - Kurangnya Ketersediaan Kegiatan Pelatihan Control : - Rendahnya Ketersediaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Manfaat : - Meningkatkan Efektifitas dan Kreatifitas PKK Dengan melakukan Kegiatan – Kegiatan PKK	- Kurangnya minat masyarakat terhadap ekonomi kreatif	- Kurangnya Ketersediaan Kegiatan Pemberdayaan PKK	- Menumbuhkan Kembali Kreatifitas PKK dengan melakukan kegiatan-kegiatan PKK	Koordinasi dan Pembinaan PKK	- Kegiatan jambore PKK sekali setahun - Kegiatan Pembinaan PKK rutin 12 bulan	- Input : Dana Yang dibutuhkan - Output : Terlaksananya Kegiatan Jambore dengan dana Rp15.500.000,- - Terlaksananya Kegiatan rutin PKK 12 bulan

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Langkap 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkap 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan: koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub. Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tujuan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Jumlah musrenbang kecamatan Jumlah Musrenbang Nagari se Kecamatan IV Jurai (20 Nagari)	Akses : - Kurangnya sarana dan prasarana untuk Kegiatan Musrenbang Partisipasi : - Kurangnya ketersediaan fasilitas Untuk Pelaksanaan Musrenbang Control : - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Manfaat : Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	- Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah /Kuota peserta musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan dari calon peserta musrenbang	- Kurangnya ketersediaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa - Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang - Kurangnya keiginan/ minat masyarakat untuk menghadiri musrenbang	Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Realisasi anggaran 1 kali setahun Mengumpulkan Bahan – bahan dari nagari Merekap data sesuai dengan bidangny a masing-masing	- Kegiatan pra musrenbang kecamatan dan Pramusrenbang Nagari se Kecamatan IV Jurai sekali setahun - Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Nagari se Kecamatan IV Jurai sekali setahun	- Terlaksanakan Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan dan Pramusrenbang Nagari se Kecamatan IV Jurai dengan dana :Rp.11.482.000, - - Terlaksananya Kegiatan rutin Musrenbang kecamatan dan Musrenbang Nagari se Kecamatan sekali setahun

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Langkap 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkap 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Merekomendasikan surat akte kelahiran, KK , KTP Merekomendasikan dispensasi nikah	Akses : - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi yang tepat. Partisipasi : - Kurangnya rasa kepedulian masyarakat tentang pelayanan Control : - Kurangnya informasi terhadap data yang Valid Manfaat : perlunya Update data dan pemberian informasi	- Kurangnya pemahaman dari aparat kecamatan/ petugas pelayanan - Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelayanan	- Kurangnya sarana dan prasarana yang lengkap - Kurangnya sosialisasi terkait pentingnya administrasi yang lengkap	- Keterlibatan Masyarakat yang aktif sehingga semua perencanaan yang dilakukan berorientasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap pelayanan - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya surat rekomendasi	- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan dan administrasi yang lengkap - Melakukan Koordinasi dan sosialisasi tentang pelayanan	- Data masyarakat yang melakukan pelayanan ke kecamatan	- Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan - Jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat dan peningkatan jumlah usaha yang dilakukan oleh masyarakat

Salido, 17 Mei 2023

Camat IV Jurai


FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP
 NIP.19850612 200412 2 001

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD

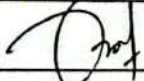
HARI/TANGGAL

TEMPAT

VERIFIKASI

: KEC. IV JURAI
: Selasa/16 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.	Indikator kinerja dibunyikan anggarannya.
2	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa.	Tambahan kegiatan rutin
3	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang di-Limpahkan kepada Camat.	Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan non Perizinan	

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, S.H-MM		ZULIRFAN HARUN KECAMATAN IV JURAI	
2	Widyantoro		DILLA PERMATA PUTRI	
3				
4	HUDA ZUSWARNI, SE			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN RANAH PESISIR
1. PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
1. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tujuan : Memperoleh usulan pembanguna	Kecamatan Ranah Pesisir secara geografis terletak pada 1000 45' – 1010 07' Bujur Timur dan 10 27,70' – 10 58,53' Lintang Selatan, dengan luas daerah tercatat sebesar 564,39 Km2 atau 9,82 % dari Luas Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lengayang, sebelah selatan dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti, sebelah timur dengan Bukit barisan Kabupaten Solok Selatan dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Topografi daerah Kecamatan Ranah Pesisir datar dan berbukit–bukit sebagai perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 3-86 meter. Kecamatan Ranah Pesisir terdiri dari 10 Nagari, yakni:	Akses : - Keterbatasan fasilitas dan akses dalam memberi pelayanan kepada masyarakat Partisipasi: - Kebutuhan masyarakat terhadap tertib administrasi yang hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak Kontrol: - Kurangnya informasi terhadap	- Anggaran terbatas	- Kurangnya fasilitas dan kases yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, ibu menyusui dan ruang bermain untuk anak.	Terumuskannya usulan program Dan kegiatan Untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023	- Menyediakan akses untuk penyandang disabilitas. - Menyediakan ruang ibu menyusui. - Menyediakan ruangan ramah anak.	Data masyarakat yang dilayani di kantor Camat Ranah Pesisir.	Input : Dana yang dibutuhkan - Anggaran Rp. 30.000.000 Output : - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome : - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Ke giatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
n dari seluruh nagari	1. Nagari Palangai 2. Nagari Palangai Kaciak 3. Nagari Palangai Gadang 4. Nagari Koto VIII Palangai 5. Nagari Nyiur Melambai Palangai 6. Nagari Pasia Palangai 7. Nagari Sungai Liku Palangai 8. Nagari Sungai Tunu 9. Nagari Sungai Tunu Utara 10. Nagari Sungai Tunu Barat Jumlah Penduduk Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan jenis Kelamin: Laki-laki berjumlah 14.738 jiwa Perempuan berjumlah 15.551 jiwa Jumlah keseluruhan 30.289 jiwa Dengan Jumlah rumah tangga berjumlah 7.038 kepala keluarga (sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2019)	data yang valid. Manfaat : - Memudahkan masyarakat yang akan dilayani						

2. **PROGRAM : Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tujuan : Memperoleh usulan	Kecamatan Ranah Pesisir secara geografis terletak pada 1000 45' – 1010 07' Bujur Timur dan 10 27,70' – 10 58,53' Lintang Selatan, dengan luas daerah tercatat sebesar 564,39 Km² atau 9,82 % dari Luas Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lengayang, sebelah selatan dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti, sebelah timur dengan Bukit barisan Kabupaten Solok Selatan dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Topografi daerah Kecamatan Ranah Pesisir datar dan berbukit–bukit sebagai perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 3-86 meter. Kecamatan Ranah Pesisir terdiri dari 10 Nagari, yakni: 1. Nagari Palangai 2. Nagari Palangai Kaciak	Akses : - Keterbatasan fasilitas dan akses dalam memberi pelayanan kepada masyarakat Partisipasi: - Kebutuhan masyarakat terhadap tertib administrasi yang hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak Kontrol: - Kurangnya informasi terhadap data yang valid.	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - Masih rendah pemahaman komitmen dari pihak terkait tentang pemahaman musrenbang	- Kurangnya keinginan /minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang - Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang - Adanya kesibukan /kegiatan lain dari calon peserta musrenbang	Terumuskannya usulan program Dan kegiatan Untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023	Mengumpulkan bahan-bahan dari nagari Merekap data sesuai dengan bidangnya masing-masing Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dengan pihak terkait	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Terhimpunnya 100% usulan pembangunan dari masingmasing bidang	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas (usulan) Outcome : Tertampungnya usulan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Ke giatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
pembanguna n dari seluruh nagari	3. Nagari Palangai Gadang 4. Nagari Koto VIII Palangai 5. Nagari Nyiur Melambai Palangai 6. Nagari Pasia Palangai 7. Nagari Sungai Liku Palangai 8. Nagari Sungai Tunu 9. Nagari Sungai Tunu Utara 10. Nagari Sungai Tunu Barat Jumlah Penduduk Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan jenis Kelamin: Laki-laki berjumlah 14.738 jiwa Perempuan berjumlah 15.551 jiwa Jumlah keseluruhan 30.289 jiwa Dengan Jumlah rumah tangga berjumlah 7.038 kepala keluarga (sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka)	Manfaat : - Memudahka n masyarakat yang akan dilayani						

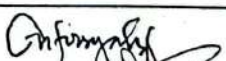
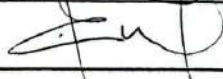

CAMAT RANAH PESISIR,
SYAFRIZAL S Sos, MAP
NIP. 19750403 200003 1 1004

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD
HARI/TANGGAL
TEMPAT
VERIFIKASI

: Kecamatan Ranah Pesisir
: Rabu/17 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

[illegible]

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Hilid Aswan		NURSYADRA S. DEWI	
2	Rafianeri		ASRIMAL	
3				
4				

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD

: KECAMATAN BAYANG

TAHUN

: 2024

PROGRAM

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KEGIATAN : Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tujuan : Memperoleh usulan pembangunan dari seluruh nagari	a. Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan setiap tahunnya. b. Jumlah Penduduk Kecamatan Bayang laki laki dan Perempuan peserta musyawarah. c. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan	1. Isu Dan Faktor Kesenjangan Gender 1. Faktor Kesenjangan a. Akses - banyaknya kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. b. Partisipasi - Rendahnya rasa kepedulian sosial masyarakat.	- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di nagari - Data kurang lengkap - Sarana dan prasarana yang kurang mendukung	1. Kurangnya keinginan/ minat masyarakat untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan 2. Kurangnya informasi tentang pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan 3. Adanya kesibukan atau kegiatan lain dari peserta musyawarah 4. Kurangnya pendukung	- Terumuskannya usulan program dan kegiatan untuk rancangan RKPD - Mengurangi Terjadinya Permasalahan	1. Mengumpulkan dan merekap data dari masing-masing nagari sesuai dengan bidangnya 2. Mengundang keterwakilan seluruh unsur/ kelompok masyarakat 3. Menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran musyawarah 4. Meningkatkan kehadiran perempuan	Data-data dari masyarakat/nagari, kantor instansi, Dinas badan terkait dan Sekolah-sekolah se Kecamatan Bayang	1. Input Anggaran - Rp.14.945.000 2. Output - Terumuskannya Rancangan RKPD Tahun 2024 3. Outcome: - Tertampungnya usulan yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan penguatan data informasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	d. Usulan Kegiatan Prioritas Yang Akan Dibiayai Oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Dan APBD Provinsi. e. Program dan Kegiatan yang diprioritaskan pada hasil Musrenbang ditingkat kecamatan banyak yang tidak dimasukkan dalam prioritas Kabupaten	- Masih kurangnya melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan c. Kontrol - Lemahnya tingkat pembinaan				dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.		

Pasar Baru, 22 Mei 2023

CAMAT BAYANG

CAMAT BAYANG

MASRI S. S.Pd

NIP. 19720506 200212 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN BAYANG
TAHUN : 2024
PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpakan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan Tujuan : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan berupa pelayanan kepada masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan yaitu : - Merekomendasikan surat dispensasi nikah - Merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga - Merekomendasikan surat keterangan berkelakuan baik - Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian	1. Isu Dan Faktor Kesenjangan Gender 1. Faktor Kesenjangan a. Akses - banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya administrasi yang tepat. b. Partisipasi - Kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap	- Kurangnya pemahaman dari aparaturnya kecamatan/ petugas pelayanan. - Kurangnya anggaran untuk pos pelayanan. - Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelayanan.	- Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait pentingnya administrasi yang lengkap kepada masyarakat. - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya surat rekomendasi	- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi yang lengkap - Advokasi dan pelatihan gender - Pendataan Penduduk	Paten yang dilaksanakan : - Laki-laki - Perempuan	- Input Anggaran Rp. 2.100.000,- - Output : Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan - Outcome: penguatan data dan Tingkat kepuasan masyarakat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Wali Nagari - Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian pejabat wali nagari - Merekomendasikan Pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Bamus Nagari dan Perangat Pemerintahan Nagari.	pengurusan administrasi yang baik. c. Kontrol • Belum maksimalnya SOP pada pengurusan administrasi. d. Manfaat • Memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan administrasi di kantor camat bayang						



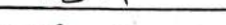
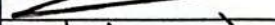
Bayang, 22 Mei 2023

NIP. 19720506 200212 1 002

TERKAITA DENGAN PERUBAHAN KUALITAS AIR DAN SUDUT TUMBUH

: KEC. BAYANG
: Selasa/16 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

[illegible]

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, SH. MM		HUTBLO KETTER, S.A.P	
2	Ugidyanoro		REC. BAFANG.	
3				
4	HILDA ZUSWARI, S.E			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim - pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2023 dan 2024 peserta yang hadir 50 orang. - komposisi jenis kelamin 1 laki-laki dan 50 perempuan. - komposisi elemen yang hadir pemerintah 10 swasta 2 masyarakat 3 (ormas.1., lsm1.)							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Permen PPN ini berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - kondisi saat ini pada peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2023 dan 2024 porsi terkait dengan isu-isu	masyarakat. kontrol - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan manfaat porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik.	renstra tidak di perbolehkan	- masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - pkk belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggara n yang maksimal			umur anak-anak (0-18 tahun) pemuda (18 – 30 th) dewasa (30 – 60 th) lansia (60 th ke atas) - tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan tahun 2023 dan 2024	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
HASIL VERIFIKASI TIM PENGGERAK PPRG								
PERBAIKAN GAP SETELAH VERIFIKASI								

Air Haji, 23 Mei 2023
 CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



BUSRASOL JALISMAN. SH
 NIP. 19661231 198903 1 062

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan : 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub. Kegiatan :1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Tujuan : Terlaksananya pembinaan TP.PKK Nagari Kecamatan Linggo Sari Baganti	- dasar pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yakni dasar pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yakni permendagri no 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden no 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan	akses - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menjangkau semua komponen pemberdayaan masyarakat dikarenakan pengurangan anggaran - jadwal kegiatan pkk harus disesuaikan dengan jadwal pkk daerah informasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat minim e-planning belum mengakomodir semua komponen peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	pengelola kegiatan belum responsif gender minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas mindset perencana di bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar	tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala opd/skpd minim makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan	- terlaksananya pembinaan tp.pkk nagari kecamatan Linggo Sari Baganti - terlaksananya gerakan masyarakat sehat (germas)	- tersedianya anggaran perjalanan dinasdan makan minum - terpenuhinya perjalanan dinasdan makan minum rapat yang dibutuhkan - terlaksananya pembinaan tp.pkk nagari kecamatan Linggo Sari Baganti - terlaksananya gerakan masyarakat sehat (germas)	- pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan tahun 2023 dan 2024 peserta yang hadir ... orang. - komposisi jenis kelamin laki-laki dan ... perempuan. - komposisi elemen yang hadir pemerintah...., swasta..., masyarakat...(ormas., lsm..)	Kegiatan 3; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Input ; Rp.15.000.000,- Output; Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina Outcome; Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina Dst.....

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD

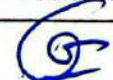
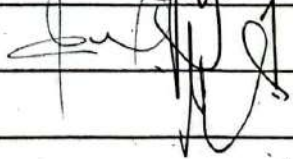
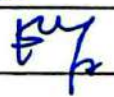
HARI/TANGGAL

TEMPAT

VERIFIKASI

: ke. Lingsan Bangun.
: Rabu/17 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pemeliharaan Gedung Kantor.	Jumlah lembaga sosial dan ekonomi masyarakat yang dipina dan koordinasi.	Pemberdayaan Desa	1/ Mempersiapkan Rencana Aksi dgn Out come / output. Seiring Membangun.
2	Pemeliharaan Peralatan Kantor	koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		2/ Rencana Aksi Diselaraskan dgn Out come & Out putnya
3	Kelengkapan PKK.			3/ Perbaikan atas GAB & GBS. utk 3 program kegiatan : 1/ Peralatan gedung kantor 2/ Pemeliharaan Gedung kantor. 3/ Kelengkapan / PKK Dit. Rencana Aksi Narasasmpc mempersiapkan dan membangun Out come / output catatan. Ponhain: GAB / GBS / Perbaikan Siteri m. Senin. 11/22/5/2023

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Yulnash SE MSr		Kharunnas.M.Kl	
2	Syofianeri. SH		ETI ptn' Tantisa	
3	IRMA YULIA SE MM			
4	ABDUL HAMID. ST			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
OPD : Kecamatan Lunang
PROGRAM : penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama kebijakan /program/kegiatan	Data pembuka wawsan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kerja
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Tujuan : Terlaksana pembangunan di 10 Nagari Kecamatan Lunang	Jumlah penduduk Kec. Lunang, L = 11. 944 P = 12.420 Jml = 24.364	Akses: 1. Keterbatasan alat komunikasi elektronik, seperti jaringan 2. Keterbatasan transportasi umum Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan Control : Kurangnya informasi terhadap data yang valid Manfaat : Perlunya Update data dan pemberian informasi	1. Kurangnya data 2. Kurangnya koordinasi 3. Komitmen yang rendah dari aparat nagari dengan masyarakat	1. Pengetahuan masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi 2. Perlakuan yang mengakibatkan masyarakat berfikir tidak ada pengaruh terhadap partisipasi yang dilakukan sehingga mereka lebih memprioritaskan pekerjaan mereka dibanding hal lainnya	Keterlibatan masyarakat yang aktif ,sehingga semua perencanaan yang dilakukan adalah berorientasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Melakukan pendataan 2. melakukan koordinasi 3. menandatangani pakta integritas 4. melakukan sosialisasi 5. Membuat SOP 6. Membuat anggaran kegiatan	Data pembangunan baik jumlah dan kualitas pembangunan serta orentasinya dalam kehidupan masyarakat	Masukan : Anggaran yang dibutuhkan Keluaran : Pelaksanaan Musrenbang RKPD Hasil : Terlaksana pembangunan di kecamatan Lunang Melalui 10 Nagari

Lunang, 10 Mei 2023
 Camat Lunang

CARYANTO S.Pd
 NIP. : 196509281991031



TABLE 1

OPD : Kecamatan Lunang
HARI/TANGGAL : Rabu/17 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

[illegible]

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, S.H.MM		SUNARDI	
2	YEFRIAL, S.H., MM		ETRI CANDRA	
3	HILDA ZUSWARNI, S.E			
4	WIDYANTORO, S.Pi			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN LENGAYANG

TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan(Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan(Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	IndikatorKin erja
Program : PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PABLIK. Kegiatan: Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat.. Tujuan : Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan Lengayang	Jumlah penduduk kecamatan lengayang berdasarkan data statistic tahun 2021 adalah : ➢ Laki-laki : 13.444 ➢ Perempuan : 31.049 ➢ Jumlah : 44.493 Jiwa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Di Kecamatan Lengayang Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan adalah : - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan fungsi hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang - Surat Izin Tempat Usaha Skala Kecil - Izin Penelitian/Survey di	Akses : Kurangnya Transportasi Umum Yang Ada Di Setiap Nagari Serta Saranan dan Prasaranan Pelayanan yang Belum Responsive Gender Partisipasi : Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan administrasi perizinan dan administrasi lainnya Kontrol : Masih belum maksimalnya informasi dan sosialisasi tentang SOP pengurusan administrasi perizinan dan administrasi lainnya belum maksimalnya penerapan aturan administrasi yang harus dimiliki oleh masyarakat Manfaat : Belum maksimalnya sanksi bagi masyarakat yang belum/tidak tertib administrasi lainnya, sehingga masyarakat yang sudah tertib administrasi kurang merasakan manfaatnya	1. Masih kurangnya pemahaman petugas 2. Minimnya saran dan prasarana kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 3. Belum lengkapnya data administrasi perizinan dan administrasi lainnya 4. Masih kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Lengayang	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah nagari 2. Kesibukan masyarakat yang bekerja pada jam pelayanan kantor kecamatan 3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap administrasi yang harus dimiliki oleh masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana prasaranan pelayanan yang memadai dan representative gender Memberikan tempat dan fasilitas nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan	1. Penyusunan SOP dan maklumat pelayanan 2. Melengkapi sarana dan prasaranan pelayanan yang responsive gender 3. Menghimpun data administrasi perizinan dan administrasi lainnya 4. Melakukan koordinasi lintas sector yang ada di kecamatan untuk berkontribusi bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah penduduk kecamatan lengayang berdasarkan data statistic tahun 2021 adalah : ➢ Laki-laki : 13.444 ➢ Perempuan : 31.049 ➢ Jumlah : 44.493 Jiwa Masyarakat yang melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan ke Kecamatan Jumlah pelayanan tahun 2023 : - Perizinan : - IMB : 1 - Non Perizinan - Rekomendasi Penelitian : 11 - Rekomendasi Pencairan	Input Anggaran Rp.13.820.14 1. -Jumlah rekomendasi di keluarkan. Output Jumlah Pelayanan perizinan dan Non Usaha yang di Selesaik income Penguatan di informasi PPID.

	wilayah Kecamatan Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi meliputi : a. Merekomendasikan pemberian izin dan non izin b. Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian wali nagari c. Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian pejabat wali nagari d. Merekomendasikan penilaian SKP kepala UPTD/UPTB di wilayah kecamatan e. Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian kepala sekolah dan kepala UPTD/UPTB f. Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Bamus Nagari dan perangkat Pemerintahan Nagari g. Merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan kartu keluarga h. Merekomendasikan surat keterangan berkelakuan baik i. Merekomendasikan surat keterangan kematian						Dana Nagari : 17 - Rekomendasi Keterangan Meninggal Dunia : 30 - Rekomendasi Surat Keterangan Kelakuan baik : 299 - Rekomendasi Surat Keterangan Miskin : 720 - Surat Dispensasi Nikah : 34 - Surat keterangan penghasilan orang tua : 11	
--	---	--	--	--	--	--	---	--



Kambang, 19 Mei 2023
CAMAT LENGAYANG

ALPRIYENDRI.SP
NIP.197206152005011003.

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan(Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan(Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	IndikatorKinerja
Program : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan: Penyelenggaraan Musrembang RKPd Tujuan : Terselenggaraannya Musrembang RKPd	Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 Nagari dan 45 Kampung dengan jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 2021 adalah 44.340 jiwa (laki-laki) 31.214 jiwa dan perempuan 13.126 jiwa Kegiatan Musrembang RKPd dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing nagari mengutuskan peserta untuk mengikuti Musrembang RKPd di Tingkat Kecamatan Jumlah peserta yang mengikuti Musrembang RKPd tingkat Kecamatan Lengayang tahun 2023 adalah sejumlah 168 orang Jumlah peserta laki-laki : 98 orang Jumlah peserta perempuan : 70 orang	Akses : Adanya kesamaan akses mengikuti Musrembang. Jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbandingannya laki-laki 70% dan perempuan 30%, kecenderungan 0 peserta lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Partisipasi: Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan Musrembang. Kontrol : Tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat dapat diprioritaskan. Manfaat: Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan pelaksanaan Musrembang.	1. Masih kurangnya SDM dalam kegiatan perencanaan. 2. Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrembang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan.	1. Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri Musrembang. 2. Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrembang. 3. Adanya kesibukan/kegiatan lain dari calon peserta Musrembang.	1. Meningkatkan partisipasi dan kehadiran peserta Musrembang dari berbagai unsur. 2. Terpenuhinya usulan dari Nagari dengan skala prioritas untuk ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten.	1. Pelaksanaan Musrembang di tingkat Nagari dengan melibatkan semua unsur 2. Menentukan perwakilan peserta dari Nagari untuk mengikuti Musrembang tingkat kecamatan dengan keterwakilan gender 3. Melengkapi data pendukung setiap usulan pada Musrembang tingkat Nagari agar menjadi prioritas pada	Peserta musrembang yang hadir dari unsur laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan forum anak Jumlah peserta tahun 2023 : 3. Laki-laki : 98 orang 4. Perempuan : 70 orang Total : 168 orang Jumlah peserta tahun 2023 : Total : 168 orang Dengan total usulan 162 usulan dengan skala prioritas 48 usulan dengan keterwakilan perempuan 30%	5. Input Anggaran Rp.18.810.000. 6. Output Terumusnyarancangan RKPd 7. Income tertampungnya usulan masyarakat dari berbagai unsur untuk menjadi prioritas pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan(Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan(Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	IndikatorKinerja
						Musrembang tingkat kecamatan		

Kambang, 19 Mei 2023
CAMAT LENGAYANG

ALPRIYENDRI.SP
NIP.197206152005011003.



**MATRIK GENDER ANALISYS PATHWAY (GAB)
TAHUN 2023**

OPD : Kecamatan Pancung Soal
PROGRAM : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama kebijakan/program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis data (Base-line)	Indikator Kinerja
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tujuan : Terselenggaraannya Musrenbang RKPD	Kecamatan Pancung Soal terdiri dari 10 Nagari dan 24 kampung dengan jumlah penduduk berdasarkan data statistik Tahun 2021 adalah 26.570 jiwa (laki-laki) 13.444 jiwa dan perempuan 13.126 jiwa Kegiatan Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing nagari mengutuskan peserta untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD tingkat kecamatan pancung soal Tahun 2023 adalah sejumlah 80 orang Jumlah peserta laki-laki : 53 orang	Akses Adanya kesamaan akses mengikuti Musrenbang. Jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan Perempuan dengan perbandingannya laki-laki 70% dan perempuan 30%. Kecenderungan O peserta lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Partisipasi Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang.	1. Masih kurangnya SDM dalam kegiatan perencanaan 2. Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan.	1. Kurangnya keinginan/ minim masyarakat untuk Menghadiri Musrenbang 2. Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang 3. Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang.	1. Meningkatkan partisipasi dan kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur. 2. Terpenuhinya usulan dari Nagari dengan skala prioritas untuk ditindaklanjuti ke tingkat Kabupaten.	1. Pelaksanaan musrenbang di tingkat Nagari dengan melibatkan semua unsur 2. Menentukan perwakilan peserta dari Nagari untuk mengikuti musrenbang tingkat kecamatan dengan keterwakilan gender 3. Melengkapi data pendukung setiap usulan pada musrenbang tingkat Nagari agar menjadi Prioritas pada musrenbang tingkat kecamatan	Peserta musrenbang yang hadir dari unsur laki-laki, perempuan, Lansia, disabilitas dan Forum anak Jumlah peserta Tahun 2023 : - Laki-laki = 53 orang - Perempuan = 27 orang Total 80 orang Jumlah peserta Tahun 2023 : Total ; 80 orang dengan total usulan 45 usulan dengan skala prioritas 10	Input : Anggaran Rp. 6.000.000 Output : Terumuskannya rancangan RKPD Income : Tertampungnya usulan masyarakat dari berbagai unsur untuk menjadi prioritas pembangunan

	Jumlah peserta perempuan 27 orang	Kontrol Tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat dapat diprioritaskan.					usulan dengan keterwakilan perempuan 40%	
	Jumlah usulan yang tetampung pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nagari sebanyak 114 usulan dan diprioritaskan Musrenbang pada saat Musrenbang RKPD Tk Kecamatan menjadi 50 usulan	Manfaat Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan pelaksanaan Musrenbang						


 Pangasinan, 21 Maret 2023
 CAMAT PANCUNG SOAL,
 KECAMATAN
 PANCUNG SOAL
 AFLIZEN S. Sos
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 19720605 199303 1 005

menyebutkan bahwa Camat selaku pejabat kewenangan pemerintahan, meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan adalah : a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan fungsi hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan perumahan oleh pengembang b. Surat Izin Tempat Usaha Skala Kecil c. Izin Penelitian/Survey di wilayah kecamatan	Belum dilaksanakan penerapan aturan administrasi yang harus dimiliki oleh masyarakat Manfaat Belum maksimalnya sanksi bagi masyarakat yang belum/tidak tertib administrasi perizinan dan administrasi lainnya, sehingga masyarakat yang sudah tertib administrasi kurang merasakan manfaatnya						Surat Keputusan Materi : 10 Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua : 5
---	---	--	--	--	--	--	--

g. Merekomenda sikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan kartu Keluarga							
h. Merekomenda sikan surat keterangan berkelakuan baik							
i. Merekomenda sikan surat keterangan kematian							


 Pangrapura, 21 Maret 2023
 CAMAT PANCUNG SOAL,
 KEKAMATAN
 PANCUNG SOAL
AFIZEN.S.sos
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19720605 199303 1 005

MATRIK GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2024

OPD : Kecamatan Pancung Soal

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama kebijakan/program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana ke Depan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			Basis data (Base-line)	Indikator Kinerja
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah penduduk Kecamatan Pancung Soal berdasarkan data statistic Tahun 2021 adalah : ➤ Laki-laki : 13.444 ➤ Perempuan : 13.126 ➤ Jumlah : 26.570 jiwa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Pancung Soal berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Perlindungan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat	Akses Kurangnya transportasi umum yang ada di setiap Nagari serta Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum responsive gender Partisipasi Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan administrasi perizinan dan administrasi lainnya Kontrol Masih belum maksimalnya informasi dan sosialisasi tentang SOP pengurusan administrasi perizinan dan administrasi lainnya	1. Masih kurangnya pemahaman petugas Nagari 2. Minimnya saran dan prasarana kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 3. Belum lengkapnya data administrasi perizinan dan administrasi lainnya 4. Masih kurangnya SDM yang ada di kecamatan pancung soal	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah nagari 2. Kesibukan masyarakat yang bekerja pada jam pelayanan kantor kecamatan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap administrasi yang harus dimiliki oleh masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan representative serta responsive gender Memberikan tempat dan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan	1. Penyusunan SOP dan maklumat pelayanan 2. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang responsive gender 3. Menghimpun data administrasi perizinan dan administrasi lainnya 4. Melakukan koordinasi lintas sector yang ada di kecamatan untuk berkontribusi bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat yang melakukan pelayanan perizinan dan Non perizinan ke Kecamatan Jumlah Pelayanan tahun 2022 : 1. Perizinan : - IMB : 4 2. Non Perizinan - Rekomendasi Penelitian : 8 - Rekomendasi Pencairan Dana Nagari : 150 - Rekomendasi Keterangan meninggal : 23 - Rekomendasi surat keterangan kelakuan baik : 71 - Rekomendasi Perangkat Nagari : 4 - Rekomendasi surat keterangan miskin : 439	Input : Anggaran Rp. 12.000.000 Output : Jumlah masyarakat yang terlayani Income : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

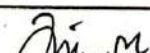
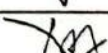
Pelimpahan
kwenangan pada
aspek
rekomendasi
meliputi :

- a. Merekomenda
sikan
pemberian izin
dan non izin
- b. Merekomdasik
an
pengangkatan
dan atau
pemberhentia
n Wali Nagari
- c. Merekomenda
sikan
pengangkatan
dan atau
pemberhentia
n pejabat Wali
nagari
- d. Merekomenda
sikan
penilaian SKP
kepala
UPTD/UPTB
di wilayah
kecamatan
- e. Merekomenda
sikan
pengangkatan
dan atau
pemberhentia
n kepala
sekolah dan
kepala
UPTD/UPTB
- f. Merekomenda
sikan
pengangkatan
dan atau
pemberhentia
n anggota
Bamus Nagari
dan perangkat
Pemerintahan
Nagari

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : Kecamatan Pancung Soal
HARI/TANGGAL : Rabu/17 Mei 2023
TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
VERIFIKASI

[illegible]

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, S. H. MM		ZUL FAHMI YANDRA	
2	YEFRIAL, S. H., MM		DANIEL AGUSTIAN	
3	HILDA ZUSWARNI, S.E		FITRI SUSANTI	
4	WIDYANTORO, S. Pi			

MATRIK GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2024

OPD : Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
PROGRAM : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama kebijakan/ program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis data (Base-line)	Indikator Kinerja
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tujuan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Menghimpun Permasalahan dan Penyampaian Program dan Usulan	Jumlah penduduk Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdasarkan data statistic Tahun 2021 adalah : ➤ Laki-laki : 8.043 ➤ Perempuan : 7.783 ➤ Jumlah : 15.826 jiwa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Perlimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan,	Akses ➤ Banyaknya kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum Masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian Pemerintah ➤ Banyaknya Aspirasi masyarakat yang tidak dikabulkan dikarenakan Anggaran yang terbatas ➤ Adanya Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa seimbang Laki-laki 50 Persen Perempuan 50 Persen. Namun	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan Musrenbang Sudah Berkompeten 2. Anggaran yang digunakan untuk Musrenbang Adalah APBD dan Belum Tercover untuk Kegiatan Musrenbang 3. Sistem yang dipakai dalam Kegiatan musrenbang sudah terintegrasi dan Komprehensif	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pada lembaga/ masyarakat 2. Masih rendahnya pengetahuan dan kemauan para pegawai untuk resnponsve Gender 3. Masih adanya Persepsi dari kalangan pegawai kalau bahwasanya pegawai perempuan hanya mengerjakan Pekerjaan bidang administrasi	1. Terlaksananya kegiatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa 2. Meningkatkan pemenuhan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender	1. Saat pelaksanaan Rapat Musyawarah Kecamatan pihak pegawai Kecamatan akan lebih aktif mengundang perwakilan perempuan misalnya LPM, PKK dan Dharmawanit a Persatuan dll 2. Pengawasan teknis kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan yang meliputi LPM, PKK dan Dharmawanit a Persatuan	- Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 1 Kali dalam setahun - Pra Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 1 Kali dalam Setahun - Pra Musrenbang Nagari sebanyak 1 Kali Setahun - Musrenbang Nagari 1 Kali Setahun - Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebanyak 10 Lembaga - PKK Nagari	Output : - Pelaksanaan Musrenbang RKPD - Jumlah Lembaga /Masyarakat yang ikut serta dalam Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Jumlah Lembaga/Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang RKPD Income : Anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp. 16.500.000

Masyarakat kepada Pemerintah	meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan adalah : a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan fungsi hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan perumahan oleh pengembang b. Surat Izin Tempat Usaha Skala Kecil c. Izin Penelitian/Survey di wilayah kecamatan Pelimpahan kwenangan pada aspek rekomendasi meliputi : a. Merekomendasikan pemberian izin dan non izin b. Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Wali Nagari c. Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian pejabat Wali nagari d. Merekomendasikan penilaian SKP	Jumlah Aparat laki-laki mendapatkan informasi lebih banyak dibandingkan Perempuan Partisipasi Proporsi peserta penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa RKPD tingkat Kecamatan lebih didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan dengan Perbandingan 80 Persen Lebih besar dibandingkan perempuan 20 persen Kontrol Lemahnya Tingkat Pembinaan Lembaga/Masy arakat Manfaat Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mengajukan usulan perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang)		4. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Musyarawar ah Perencanaan Pembangunan di desa m m			sebanyak 10 Lembaga - Dharmanita Persatuan Sebanyak 1 Lembaga	
------------------------------	---	---	--	---	--	--	--	--

	kepala UPTD/UPTB di wilayah kecamatan	Laki-laki sebanyak 60 Persen dan						
e.	Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian kepala sekolah dan kepala UPTD/UPTB	Perempuan sebanyak 40 Persen						
f.	Merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Bamus Nagari dan perangkat Pemerintahan Nagari							
g.	Merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan kartu Keluarga							
h.	Merekomendasikan surat keterangan berkelakuan baik							
i.	Merekomendasikan surat keterangan kematian							

Pasar Beriang, 22 Mei 2023
CAMAT RANAH AMPEK NULU TAPAN



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M

Penata Tk.1 (III/d)

NIP. 19960509 202012 2 010

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD

HARI/TANGGAL

TEMPAT

VERIFIKASI

: Kecamatan Ranah IV Huru Tapan
: Rabu/17 Mei 2023
: Ruang Rapat Bapedalitbang

[illegible]

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	FADLI AMRA, SH, MM		NURMAILINDA	
2	TEPRIAL, SH, MM		MURAIMI	
3	HILDA ZUSWARI, SE			
4	WIDYANTORO, S.P.			



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249

Email: kecamatansilaut15@gmail.com

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tujuan : Terumuskannya usulan program kegiatan pembangunan dari semua Nagari tahun anggaran 2024.	Jumlah Penduduk: 15.592 jiwa L = 8.023 jiwa P = 7.569 jiwa luas wilayah: 466,45 Km ² Jumlah Nagari = 10 Nagari Jumlah Kampung = 27 Kampung Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang. Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2022 sebanyak 132 peserta, dari 132 peserta diikuti oleh 90 peserta laki-laki dan 42 peserta perempuan. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Silaut 2023 sebanyak 36 usulan	Akses: Adanya kesamaan akses mengikuti Musrenbang jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbandingan laki-laki 68% dan perempuan 32%. Partisipasi : Utusan peserta dari undangan sebagian besar diwakili oleh laki-laki. Kontrol : - Peserta didominasi oleh laki-laki. - Masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat. - Rendahnya kepedulian aparatur pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender. Manfaat : Rendahnya komitmen untuk mengintegrasikan GAP dan GBS pada RKA- SKPD.	- Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang. - Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan. - Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang.	- Pengetahuan masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi. - Perlakuan yang mengakibatkan masyarakat berfikir untuk tidak ada pengaruh terhadap partisipasi yang dilakukan, sehingga mereka lebih memperioritas kan pekerjaan mereka dibanding hal lainnya.	Terumuskannya usulan program kegiatan pembangunan dari semua Nagari tahun anggaran 2024.	- Mengusulkan regulasi kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang - Mengumpulkan bahan- bahan dari nagari Untuk mengetahui usulan dari masing- masing nagari. - Merekap data sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk membedakan kegiatan per bidang. - Distribusi undangan ke nagari. - Menjalni koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	- Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur. - Terhimpunnya 100% usulan Pembangunan dari masing- masing bidang. - Dari kehadiran tahun 2024 sehingga kegiatan musrenbang berjalan lancar. - Membuat regulasi kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang	Input : Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Output : Terumuskannya usulan program kegiatan pembangunan dari semua Nagari tahun anggaran 2024. Outcome : Meningkatnya jumlah nagari yang memiliki GAP-GBS pada lampiran Rencana Kerja dan Anggaran Nagari.



Silaut, 22 Mei 2023
Camat Silaut,

SYAMWIL, SSTP., MM.

NIP.19820113 200112 1 003

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Kode Sub Keg.	7.01.02.2.04.02
Tujuan	Tertib Administrasi Masyarakat
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah Penduduk Kecamatan Silaut: L = 8.023 jiwa P = 7.569 jiwa Jumlah = 15.592 jiwa luas wilayah 466,45 Km² Jumlah Nagari = 10 Nagari Jumlah Kampung = 27 Kampung 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses - Keterbatasan Alat Komunikasi Elektronik, seperti jaringan - Transportasi umum Partisipasi - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi yang hanya berdasar kebutuhan yang mendesak Kontrol - Kurangnya Informasi terhadap data yang valid Manfaat - Perlunya update data dan pemberian informasi. b. Penyebab Internal - Kurangnya data - Kurangnya koordinasi - Komitmen yang rendah dari aparat nagari dengan masyarakat c. Penyebab Eksternal - Pengetahuan masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi - Perlakuan yang mengakibatkan masyarakat berfikir untuk tidak ada pengaruh terhadap partisipasi yang dilakukan, sehingga mereka lebih memprioritaskan pekerjaan mereka dibanding hal lainnya.
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur - Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Indikator dan Target Kinerja - Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terkait dengan Nonperizinan.
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 6.000.000,-
RENCANA AKSI	Sosialisasi kepada Masyarakat terkait tatacara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Masyarakat Rekap data capaian rekomenasi terkait dengan Nonperizinan.  22 Mei 2023 CAMAT SILAUT, SYAMUUL, SSTP., M.M. 00198201132001121003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249

Email: kecamatansilaut15@gmail.com

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Tujuan : Tertib Administrasi Masyarakat	Jumlah Penduduk Kecamatan Silaut: L = 8.023 jiwa P = 7.569 jiwa Jumlah = 15.592 jiwa luas wilayah 466,45 Km² Jumlah Nagari = 10 Nagari Jumlah Kampung = 27 Kampung	Akses: - Keterbatasan Alat Komunikasi Elektronik, seperti jaringan - Transportasi umum Partisipasi : Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi yang hanya berdasar kebutuhan yang mendesak. Kontrol : Kurangnya Informasi terhadap data yang valid Manfaat : Perlunya update data dan pemberian informasi.	- Kurangnya data. - Kurangnya koordinasi. - Komitmen yang rendah dari aparat Nagari dengan masyarakat.	- Pengetahuan masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi. - Perlakuan yang mengakibatkan masyarakat berfikir untuk tidak ada pengaruh terhadap partisipasi yang dilakukan, sehingga mereka lebih memprioritaskan pekerjaan mereka dibanding hal lainnya.	Terlaksananya tertib Administrasi Masyarakat	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait tatacara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Masyarakat - Rekap data capaian rekomendasi terkait dengan Nonperizinan.	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terkait dengan Nonperizinan	Input : Anggaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Output : Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terkait dengan Nonperizinan. Outcome : Terlaksananya tertib Administrasi Masyarakat



Silaut, 22 Mei 2023

CAMAT SILAUT,

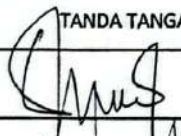
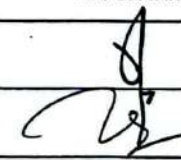
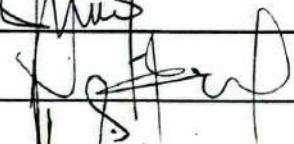
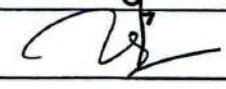
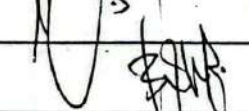
SYAMWIL, SSTP., MM.

NIP.198201132001121003

LEMBAR VERIFIKASI GAP DAN GBS TAHUN 2024

OPD : Ke. Silaut.
 HARI/TANGGAL : Rabu/17 Mei 2023
 TEMPAT : Ruang Rapat Bapedalitbang
 VERIFIKASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HASIL VERIFIKASI
1	Pemberdayaan Masy. Desa & Kelurahan.	Pemberdayaan Lembaga Komasy & Kecamatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.	Perbaikan data GAB & GBS utk 3 Ayoan / Kegiatan: - Perawatan Gedung - Pemeliharaan Gedung Ketr. - Kelembagaan / PKIC. Utk - Rencana Aksi pd Narasi & deskripsi dan nyambung dgn outcome / output. Perbaikan GAB / GBS perbaikan di forum pd Jumat Senin ts/ 22/5-2023 Persebutan Soft copy & Hard copy

NO	NAMA TIM DRIVER	TANDA TANGAN	OPD YANG DIVERIFIKASI	TANDA TANGAN
1	Yolianti S.E. Msi		Hasan	
2	Syopani S.H		Retnaningsih	
3	Nima Yulia S.kom. MM			
4	Hasan Abdul Hamid S.P			

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

TAHUN 2024

OPD : Camat Koto XI Tarusan

Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Sub.kegiatan: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tujuan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari Se Kecamatan Koto XI Tarusan (23 Nagari)	Akses : - Kurangnya Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Kreatif Partisipasi : - Kurangnya Ketersediaan kegiatan Pelatihan Control : - Rendahnya Ketersediaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Manfaat : - Meningkatkan Efektifitas dan Kreatifitas PKK Dengan melakukan kegiatan-Kegiatan PKK	Kurangnya minat masyarakat terhadap ekonomi kreatif	Kurangnya Ketersediaan Kegiatan Pemberdayaan PKK	Menumbuhkan Kembali Kreatifitas PKK dengan melakukan kegiatan-kegiatan PKK	Realisasi Anggaran PKK Selama 12 Bulan	- Kegiatan Jambore PKK sekali Setahun - Kegiatan Pembinaan PKK rutin 12 bulan	Terlaksananya kegiatan jamboree Terlaksananya kegiatan rutin PKK 12 bulan

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Sub.kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tujuan : Tersedianya Peralatan Mebeleur Gedung Kantor Camat Koto XI Tarusan	- Mebeleur pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Pengadaan terakhir pada tahun 2016 terjadi rusak berat - Jumlah Meja yang Rusak Berat sebanyak 13 unig - Jumlah kursi camat 1 unit rusak bera - 12 Unit kurang dan Tidak Layak Pakai pada Eselon IV dan Staf	Akses : - Meja yang dipakai sangat tidak layak untuk digunakan - Kursi yang digunakan tidak layak	- Belum tersedianya Anggaran untuk dilakukan Pengadaan Meja dan Kursi Kantor Camat Koto XI Tarusan	-Butuhnya Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang layak	Meningkatkan Kinerja Aparatur Kantor Camat Koto XI Tarusan.	- Pengadaan Peralatan Mebeleur Kantor - Pemeliharaan terhadap Mebeleur kantor - Pembelian terhadap sarana dan prasarana Mebeleur kantor camat Koto XI Tarusan	- Jumlah ASN kantor Camat koto XI Tarusan sebanyak 20 orang - Kondisi Mebeleur jika ditambahkan dengan Staf Honoror sebanyak 10 orang maka Mebeleur yang rusak dengan jumlah tidak terpenuhi	Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana Input : Anggaran yang dibutuhkan Rp. 120.000.000. Ouput: Tersedianya Mebeleur Kantor Outcome : Tersedianya Mebeleur yang memadai

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum. Sub.kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Tujuan : Adanya Gedung Kantor Camat Koto XI Tarusan yang representatif	- Gedung Kantor camat koto XI tarusan yang dibangun tersebut pada tahun 2010 - Gedung tersebut terjadi kebocoran di beberapa titik	Akses : - Terjadinya kurang maksimal pelayanan masyarakat Partisipasi : - Dukungan dari pemerintah daerah Control : - Disampaikan pada dinas terkait Manfaat : - Terselenggaranya pelayanan secara maksimal	-Harus ada perbaikan dan anggaran perbaikan gedung tersebut	-terganggunya pelayanan masyarakat	Tercapainya pelayanan terhadap masyarakat dengan gedung representatif	- Dilakukan Rehab sedang secara menyeluruh - Untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal	- Terciptanya pelayanan masyarakat kecamatan Koto XI tarusan lebih maksimal	Kegiatan : rehap Sedang gedung Kantor Camat Koto XI Tarusan Input : Anggaran yang dibutuhkan Rp. 300.000.000. Output: pengadaan perbaikan Kantor Camat Koto XI Tarusan Outcome ; Terpenuhinya Fasilitas Kantor yang nyaman dan Representatif

PEMERINTAH KABUPATEN
Koto XI Tarusan, 15 Mei 2023
CAMAT KOTO XI TARUSAN
KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN
(NURLAINI SE.M.Si)
NIP. 19691024 139003 2 002